

**PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA ORDE BARU DI MAMBI
KABUPATEN MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT**

(SUATU TINJAUAN SEJARAH)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Kewajiban dan Melengkapi Syarat Guna
Mempeloreh Gelar Sarjana Humaniora pada Jurusan
Sejarah dan Kebudayaan Islam**

OLEH

NAWIR

NIM : 40200114030

ALAUDDIN
MAKASSAR

**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2019

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbilaa'lamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: *Perkembangan “Islam pada Masa Orde Baru di Mammi Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tahun 1966-1998”* dapat terselesaikan sekalipun dalam pembahasan dan penguraiannya masih sederhana. Shalawat serta salam taklupa saya haturkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga serta para sahabat.

Dalam rangka proses penyelesaian skripsi ini, banyak kendala dan hambatan yang saya temukan, tetapi dengan keyakinan dan usaha kerja keras serta kontribusi Ayahanda Kasman, dan ibunda Kamaria yang sangat saya cintai dan saya sayangi, yang selama ini suda selalu memberikan motipasi, dukungan, dan kasih sayangnya selama ini semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya amin. yang selama ini dengan ikhlas membantu saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Meskipun demikian, saya menyadari bahwa skripsi ini memiliki banyak kekurangan, untuk itu diperlukan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Selain itu penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang selama ini membantu proses perkuliahan penulis sebagai mahasiswa strata satu hingga menyelesaikan skripsi sebagai bagian akhir dari perjalanan studi penulis, akumulasi ungkapan terima kasih itu penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. Selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Mardan, M.Ag. Wakil Rektor I UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, MA. Wakiln Rektor II dan Prof. Dr. Hj. Siti Aisyah Kara, M.Ag. Ph.D Wakil rektor III, serta wakil rector IV Prof. Dr. Hamdan

Johannes, atas kepemimpinan dan kebijaksanaan yang telah memberikan banyak kesempatan dan fasilitas kepada saya demi kelancaran dalam proses penyelesaian studi saya.

2. Bapak Dr. H. Barsihannor, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Adab dan Humaniora beserta wakil Dekan I Dr. Abd. Rahman R. M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Hj. Syamsyan Syukur, M.Ag dan Wakil Dekan III Muh. Nur Akbar Rasyid M.Pd, M.Ed Ph.D Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami selama dalam proses perkuliahan sampai menyelesaikan studi.
3. Ibu Dr. Hj. Syamzan Syukur, M.Ag, dan Bapak Dr. Nasruddin, MM masing-masing sebagai pembimbing pertama dan kedua yang telah meluangkan waktu dan perhatian memberikan bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hj. Suraya Rasyid, M.Pd dan Dr. Abu Haif. M.Hum. sebagai penguji pertama dan kedua yang telah memberikan masukan dan petunjuk serta saran kepada saya sehingga saya dapat memperbaiki dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Dr. Rahmat, M.Pd.I. dan Bapak Dr. Abu Haif, M.Hum. Ketua dan Sekretaris Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar atas ketulusan dan kebijaksanaan dalam memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian studi kami.
6. Bapak dan Ibu Dosen, atas segala bekal ilmu yang telah diberikan selama menyusun menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar.
7. Saudara-saudara saya: Sainal, Mustaman, Mirja Wati, Nurja, Nursi, Mulki, dan Sari yang telah banyak memberikan dukungan moral dan material serta doa untuk saya dalam penyelesaian proses akademik.

8. Seluruh keluarga yang telah banyak memberikan dukungan moral dan material serta doa untuk saya dalam penyelesaian proses akademik.
9. Seluruh staff dan pegawai dalam lingkup Fakultas Adab dan Humaniora secara khusus dan dalam lingkup kampus UIN Alauddin Makassar secara umum, yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam kelancaran administrasi.
10. Keluarga Besar jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Angkatan 2014 sebagai wadah untuk berproses selama penulis menempuh perkuliahan di UIN Alauddin Makassar.
11. Kepala-Kepala desa di Kecamatan Mambi dan jajarannya yang telah memberikan data dan informasi kepada saya untuk proses penyusunan skripsi ini.
12. Tokoh-tokoh masyarakat serta tokoh agama yang telah memberikan data dan informasi kepada saya untuk proses penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman angkatan 2014 Sejarah dan Kebudayaan Islam yang selalu memberikan semangat dan do'a kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
14. Kakanda dan Adinda di Himpunan Mahasiswa Sejarah dan Kebudayaan Islam (HIMASKI), yang senantiasa memberikan semangat dan arahan serta do'a kepada saya.
15. Kakanda dan Adinda di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang senantiasa memberikan semangat dan arahan serta do'a kepada saya
16. Kakanda dan Adinda di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga (UKM Olahraga) yang senantiasa memberikan semangat dan arahan serta do'a kepada saya
17. Saudara seposko Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angk. ke-58 Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa atas dukungan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

18. Rekan-rekan saya yang ikhlas membantu baik moral maupun material dalam penyelesaian skripsi ini, yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata, terimah kasih yang sebanyak-banyaknya atas segala bantuan dan dukungan berbagai pihak, semoga bantuan dan jerih payahnya dapat terbalas dan mendapatkan pahala disisi Allah swt.

Semoga skripsi ini dapat menjadi tambahan referensi, informasi bagi para akademisi maupun praktisi khususnya dalam bidang Sejarah Kebudayaan Islam serta masyarakat luas pada umumnya.

Gowa, 12 Maret 2019 M

Penulis

Nawir

NIM: 40200114030



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1-13
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian.....	4
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
 BAB II KAJIAN TEORETIS	 14-38
A. Kondisi Islam di Indonesia pra Orde Baru	14
B. Kondisi Islam di Indonesia pada Masa Orde Baru	23
 BAB III METODE PENELITIAN	 39-43
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Metode Pengolahan dan Analisis data.....	42
 BAB IV HASIL PENELITIAN	 46-56
A. Lokasi Penelitian	46
B. Sejarah Masuknya Islam di Mambi	46
C. Posisi Islam di Mambi pada masa Orde Baru.....	49
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Islam Di Mambi....	51

BAB V	PENUTUP	57-61
	A. Kesimpulan	57
	B. Implikasi	61
DAFTAR PUSTAKA		62-63
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		



ABSTRAK

Nama Penyusun : Nawir
NIM : 40200114030
**Judul Skripsi : Perkembangan Islam pada Masa Orde Baru di Mambi
Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat tahun 1966-
1998**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perkembangan Islam pada masa Orde Baru di beberapa desa yang ada di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat,

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research* (lapangan) dengan menggunakan metodologi sosiologi antropologi budaya dan agama, namun tidak mengabaikan pendekatan historis, pendekatan antropologi dan pendekatan agama dengan tahap pengumpulan data melalui observasi, wawancara atau *interview*, dan dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, agama Islam pertama kali masuk di wilayah kecamatan Mambi Pada abad ke 17 m Ataub tahun 1602 m yang di bawa oleh seorang penganjur agama yang bernama Toilang. *Kedua*, Proses perkembangan Islam di Mambi pada masa Orde Baru adalah di mulai dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan pendidikan agama itu mulai di ajarkan dari tingkat sekolah dasar selain dari itu islam juga di Mambi berkembang dari segi politik itu dapat di lihat dari posisi islam yang ada di sana yang bersifat minoritas namun mampu hidup berdampingan dengan agama agama lain yang ada di kecamatan mambi, selain itu karna juga meskipun kecamatan Mambi secara khusus adalah minoritas islam tapi pusat pemerintahan waktu itu kemudian secara administrasi masuk kedalam wilayah Kabupaten Polmas waktu itu yang yang masi di bawa naungan Privinsi Sulawesi selatan yang nota benenya ketika di gabungkan dengan wilayah Kabupaten Polmas waktu itu maka tentu bukan lagi minoritas secara umum. *Ketiga*, Faktor Pendukung Perkembangan Islam di Mambi pada masa Orde Baru ada tiga yang pertama adalah pendidikan, Kebudayaan dan juga Politik.

Saya berharap masyarakat tetap menjaga nilai nilai kebersamaan hususnya yang suda di jalin oleh masyarakat kecamatan Mambi agar kiranya nila-nilai persatuan Islam ini tetap terjaga dan bahkan harus di tingkatkan karna persatuan adalah salah satu kekuatan yang paling besar yang bisa merubah kita dari Islam yang minoritas menuju Islam yang Mayoritas.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara sosiologis-antropologis masyarakat yang tinggal di bagian Selatan dan Barat pulau Sulawesi, terdiri atas empat suku bangsa yaitu: Suku Mandar, Suku Toraja, Suku Bugis dan Makassar. Dalam beberapa aspek kehidupan mereka, keempat Suku tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan, baik nilai-budaya maupun sistem kepercayaan.¹

Khusus dalam sistem kepercayaan, keempat suku bangsa yang mendiami pulau Sulawesi bagian selatan ini pada prinsipnya sama, yakni kepercayaan kepada satu Dewa Tunggal yaitu *Dewata Seuwae* pada masyarakat Bugis, *Karaeng Kaminang Kammaya* pada masyarakat Makassar dan *Puang Matua* dalam masyarakat Toraja.²

Dari segi pemahaman dan kepercayaan mereka terhadap *Dewa Tunggal* masing-masing berbeda. Kemudian perbedaan-perbedaan itu sangat berpengaruh dalam menentukan sikap sekaligus sangat berpengaruh dalam menerima sesuatu nilai terhadap sentuhan-sentuhan kultural yang berasal dari luar lingkungannya, terutama yang bersangkutan paut dengan masalah kepercayaan dari suatu ajaran. Ajaran itu akan diterima sepanjang sistem nilai yang kandungannya mempunyai relevansi dengan sistem nilai yang melembaga dalam masyarakat; atautkah sistem nilai yang baru tersebut dianggap oleh mereka mampu menutupi kebutuhan hidup mereka, baik dari segi material maupun dari segi spritual, yang kesemuanya itu diukur dengan sistem nilai tertinggi yang berpusat pada Dewa Tunggal tadi.³

¹Samiang Katu, *Peta Islamisasi dan Kristenisasi di Sulawesi Selatan* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 1-2.

²Samiang Katu, *Peta Islamisasi dan Kristenisasi di Sulawesi Selatan*

³Samiang Katu, *Peta Islamisasi dan Kristenisasi di Sulawesi Selatan*.

Dewata Seuwae pada masyarakat Bugis dan *Karaeng Kaminang Kammaya* pada masyarakat Makassar dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai nilai tertinggi dalam kehidupan mereka.

Hal tersebut apabila dilihat dari sudut kepercayaan, dapat digolongkan sebagai perwujudan dari konsepsi ketuhanan mereka. Segala sesuatu yang diperbuat senantiasa disandarkan kepada *Dewata Seuwae dan Karaeng Kaminang Kammaya*. Di sanalah merupakan titik awal dan akhir dari segala sesuatu.

Kepercayaan dan penyembahan mereka terhadap kepercayaan tersebut berlangsung terus menerus dari keturunan satu ke keturunan lainnya sehingga mampu bertahan di dalam masyarakat dan dijunjung tinggi sampai penyebaran agama Kristen dan Islam masuk di bagian wilayah Selatan dan Barat pulau Sulawesi, sekitar abad XVII M.⁴

Menurut catatan sejarah, agama monoteistik yang pertama kali dijumpai di Sulawesi Selatan pada saat itu sebelum datangnya agama Islam adalah agama Katolik. Hadimuljono mencatat bahwa pada tahun 1543 di Siang Pangkep (Pangkajene Kepulauan) dan Suppa pada masa raja La Makkarawie menduduki tahtakerajaan di daerah tersebut, sudah ada penganut agama Katolik berkat seorang penginjil bangsa Portugis, bernama Antonio de Payva.⁵

Dalam kaitannya dengan Perkembangan Islam Pada Masa Orde Baru di Mambo Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat bahwa dalam penyebaran agama Islam di Tanah Mandar saat itu tidak mendapatkan kesulitan berat, karena kebudayaan yang ada pada saat itu sudah berbau Islam. Sehingga agama Islam yang disebarkan diterima dengan baik oleh masyarakat terutama dari pihak kerajaan yang berkuasa pada saat itu.

Pada abad XVII saat itu pemerintahan di wilayah Mandar masih berbentuk kerajaan. Terdapat empat belas kerajaan besar di tanah Mandar pada saat itu, yaitu

⁴Samang Katu, *Peta Islamisasi dan Kristenisasi di Sulawesi Selatan*.

⁵Samang Katu, *Peta Islamisasi dan Kristenisasi di Sulawesi Selatan* h. 2.

tergabung dalam konfederasi *Pitu Ulunna Salu* (tujuh kerajaan di wilayah pegunungan) dan *Pitu Baqbana Binanga* (tujuh kerajaan di wilayah pantai). Awal penyebaran agama Islam dimulai dari daerah kerajaan Binuang, yang disebarkan oleh seorang utusan kerajaan Gowa, yaitu Abdurrahman Kamaruddin. Di kawasan Kerajaan Binuang kemudian dilanjutkan ke Kerajaan Balanipa.⁶

Agama Islam masuk di tanah Mandar secara resmi diterima oleh raja Balanipa seorang pemegang kekuasaan dari konfederasi 14 kerajaan dengan ini raja Balanipa pada masa pemerintahan raja ke IV yaitu *Kakanna Pattang alias Daetta Tummuane* pada awal abad XVII atau tahun 1608 yang dibawa oleh penganjur agama Islam dari Kerajaan Gowa.

Abdurrahim Kamaluddin pertama kali tiba di daerah Biring Lembang (Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar) dan dia berhasil mengislamkan Mara'dia Pallis yaitu Kakanna Cunnang atau Daetta Cunnang ada juga yang mengatakan Tamerus selanjutnya menuju ke pusat Kerajaan Balanipa yaitu Napo dan dia diterima dengan baik oleh raja kemudian berhasil mengislamkan raja Balanipa ke VI Kakanna Pattang Daetta Tummuane. Setelah rajamasuk Islam dia pun langsung memproklamkan ke seluruh kerajaankerajan di tanah mandar sebagai agama resmi.⁷

Abdurrahim Kamaluddin adalah nama yang tidak asing lagi bagi masyarakat Islam di daerah Mandar karna dia banyak di kenal oleh masyarakat terutama yang beragama islam yang ada di beberapa kerajaan di wilayah mandar ini terjadi karna berkat raja Balanipa pada saat itu langsung memproklamkan islam sebagai agama resmi yang di bawa oleh beliau.

Nama Abdurrahim Kamaluddin telah terukir dalam sejarah Islamisasi di daerah Mandar. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum agama Islam masuk dan

⁶Andi Depu. *Adat Istiadat Kerajaan Mandar*, (Mandar: Yayasan Maha Putra Mandar, 1970), h. 23.

⁷Ahmad M Sewang, *Seputar Tentang Kerajaan Balanipa di Mandar* (Cet. 1; Mandar: Yayasan Maha Putra Mandar, 2006), h. 59

berkembang di Indonesia, masyarakat menganut animisme dan dinamisme bahkan ada yang atheisme (tidak memiliki kepercayaan) sedikit pun. Apa yang terjadi pada pulau-pulau lain (selain Pulau Sulawesi), begitu pula halnya dengan masyarakat Mandar.⁸

Raja Balanipa yang pertama dan raja kedua bahkan ketiga belum pernah didatangi oleh seorang penganjur Islam. Kemudian, pada saat periode pemerintahan Daetta Tummuane, alias Kakanna Pattang Raja Balanipa ke IV, seorang penganjur agama yaitu Abdurrahim Kamaluddin datang menyebarkan agama Islam. Dan setelah raja balanipa memproklamirkan Islam di situlah masyarakat dari Pitu Ulunna Salu juga datang menimba ilmu-ilmu agama yang sudah terlebih dahulu dianut oleh masyarakat Mandar yang ada di bagian pesisir terkhusus Balanipa yang dilakukan oleh pedagang-pedagang dari sana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok masalah yaitu bagaimana proses Perkembangan Islam pada Masa Orde Baru di Mambi Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

Dari permasalahan pokok tersebut, maka dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Sejarah masuknya Islam di Mambi ?
2. Bagaimana Proses Perkembangan Islam di Mambi pada Masa Orde Baru?
3. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Islam di Mambi Pada Masa Orde Baru

⁸Ahmad M Sewang, *Seputar tentang Kerajaan Balanipa di Mandar*

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian.

Penelitian ini berfokus pada kecamatan Mambi pada masa orde baru. Yang dimaksud orde baru adalah masa pemerintahan presiden soeharto yaitu dari tahun 1966 sampai 1998.

2. Deskripsi Fokus

Orde baru adalah orde pengganti orde lama Ketika Soeharto menjadi presiden tahun 1966 sampai 1998 ketika dia mengganti presiden sebelumnya yaitu Sukarno yang pada saat itu di namai orde lama pada tahun 1945 sampai 1966.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan usaha untuk menemukan tulisan atau tahap pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan atau relevan dengan objek dan permasalahan yang akan diteliti oleh seorang peneliti.

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti dan dibahas belum ada yang meneliti dan ataupun ada namun berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti selanjutnya.

Dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menggunakan beberapa literatur yang berkaitan dengan judul skripsi yang ditulis sebagai acuan. Adapun literatur yang dianggap relevan dengan obyek penelitian ini diantaranya:

1. Ahmad M. Sewang, *Seputar tentang Kerajaan Balanipa di Mandar*, yang membahas tentang Proses Islamisasi di Mandar Kerajaan Balanipa.⁹ Beliau dalam bukunya mengatakan bahwa Agama Islam masuk di tanah Mandar secara resmi diterima oleh raja Balanipa seorang pemegang kekuasaan dari konfederasi 14 kerajaan dengan ini raja Balanipa pada masa pemerintahan raja ke IV yaitu *Kakanna Pattang alias Daetta Tummuane* pada awal abad XVII atau tahun 1608 yang dibawa oleh penganjur agama Islam dari Kerajaan Gowa.

⁹Ahmad Sewang, *Seputar tentang Kerajaan Balanipa di Bandar* (Cet. 1; Mandar: Yayasan Maha Putra Mandar, 2006)

Abdurrahim Kamaluddin pertama kali tiba di daerah Biring Lembang (Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar) dan dia berhasil mengislamkan Mara'dia Pallis yaitu Kakanna Cunnang atau daetta Cunnang ada juga yang mengatakan Tamerus selanjutnya menuju ke pusat Kerajaan Balanipa yaitu Napo dan dia diterima dengan baik oleh raja kemudian berhasil mengislamkan raja Balanipa ke VI Kakanna Pattang DaettaTummuane. Setelah raja terislamkan dia pun langsung memproklamkan ke seluruh kerajaankerajan di tanah mandar sebagai agam resmi.¹⁰

2. Bahaking Rama, *Mengislamkan Daratan Sulawesi Suatu Tinjauan Metode Penyebaran*, yang membahas tentang Pengislaman daratan Sulawesi Pada abad ke-17 kerajaan Gowa menyebarkan Islam di Mandar.

Penyebaran Islam di Mandar oleh kerajaan Gowa dilakukan secara damai, hal ini terjadi karena sebelum Islam disebarkan di Mandar, hubungan antara kerajaan Balanipa dengan kerajaan Gowa sangat baik dan akrab. Bukan hanya hubungan di bidang perekonomian dan kerja sama di bidang politik, tetapi juga terjalin hubungan kekeluargaan melalui perkawinan antar keluarga kerajaan.¹¹

3. Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, yang membahas tentang Metodologi penelitian. Tujuan dari penelitian sejarah ini yaitu untuk menemukan dan mendeskripsikan secara analisis serta menafsirkan bagaimana latar belakang sejarah Perkembangan Islam di Mambi pada Masa Orde Baru.

Penelitian sejarah merupakan penelitian yang sifatnya *nirpragmatis*, dalam artian bahwa yang diteliti adalah peristiwa atau kejadian masa lampau. Maka perlu diingat, bahwa dalam penelitian sejarah bukan aspek kurang atau lebih yang ingin dicari, akan tetapi fakta yang harus diungkap.

¹⁰Ahmad M Sewang, *Seputar tentang Kerajaan Balanipa di Bandar* (Cet. 1; Mandar: Yayasan Maha Putra Mandar, 2006), h. 59

¹¹Bahaking Rama "Mengislamkan Daratan Sulawesi Suatu Tinjauan Metode Penyebaran" (Jakarta: PT, Parado Tama Wiragemilang, 2000), h. 20-21.

Penulisan peristiwa masa lampau dalam bentuk peristiwa atau kisah sejarah supaya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, harus melalui prosedur kerja sejarah. Secara sederhana penulisan sejarah dapat dijelaskan beberapa tahapan kerja, yaitu heuristik, Kritik, Interpretasi dan historiografi.¹²

4. Samiang Katu, *Peta Islamisasi dan Kristenisasi di Sulawesi Selatan* yang membahas tentang Secara sosiologis-antropologis masyarakat yang mendiami jazirah Selatan pulau Sulawesi, terdiri atas empat suku bangsa yaitu: Suku Mandar, Suku Toraja, Suku Bugis dan Makassar. Dalam beberapa aspek kehidupan mereka, keempat Suku tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan, baik nilai-budaya maupun sistem kepercayaan.¹³

Khusus dalam sistem kepercayaan, keempat suku bangsa ini pada prinsipnya sama, yakni kepercayaan pada satu Dewa Tunggal yaitu *Dewata Seuwae* pada masyarakat Bugis, *Karaeng Kaminang Kammaya* pada masyarakat Makassar dan *Puang Matua* dalam masyarakat Toraja.

Dari segi penghayatan atau kepercayaan mereka terhadap *Dewa Tunggal* masing-masing berbeda. Kemudian perbedaan-perbedaan itu sangat berpengaruh dalam menentukan sikap sekaligus sangat berpengaruh dalam menerima sesuatu nilai terhadap sentuhan-sentuhan kultural yang berasal dari luar lingkungannya, terutama yang bersangkutan paut dengan masalah kepercayaan dari suatu ajaran.

Ajaran itu akan diterima sepanjang sistem nilai yang kandungannya mempunyai relevansi dengan sistem nilai yang melembaga dalam masyarakat; ataukah sistem nilai yang baru tersebut dianggap oleh mereka mampu menutupi kebutuhan hidup mereka, baik dari segi material maupun dari segi spritual, yang kesemuanya itu diukur dengan sistem nilai tertinggi yang berpusat pada Dewa Tunggal tadi.¹⁴

¹²Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), h. 86

¹³Samiang Katu, *Peta Islamisasi dan Kristenisasi di Sulawesi Selatan* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 1-2.

¹⁴Samiang Katu, *Peta Islamisasi danenisasi di Sulawesi Selatan*.

Dewata Seuwae pada masyarakat Bugis dan *Karaeng Kaminang Kammaya* pada masyarakat Makassar dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai nilai tertinggi dalam kehidupan mereka. Hal tersebut apabila dilihat dari sudut kepercayaan, dapat digolongkan sebagai perwujudan dari konsepsi ketuhanan mereka. Segala sesuatu yang diperbuat senantiasa disandarkan kepada *Dewata Seuwae dan Karaeng Kaminang Kammaya*.

Di sanalah merupakan titik awal dan akhir dari segala sesuatu. Penghayatan mereka terhadap kepercayaan tersebut berlangsung terus dan dijunjung tinggi sampai penyebaran agama Kristen dan Islam masuk di Jazirah Selatan pulau Sulawesi, sekitar abad XVII M.

Menurut catatan sejarah, agama monoteistik yang pertama kali dijumpai di Sulawesi Selatan sebelum datangnya agama Islam adalah agama Katolik. Hadimuljono mencatat bahwa pada tahun 1543 di Siang Pangkep (Pangkajene Kepulauan) dan Suppa pada masa raja La Makkarawie menduduki tahtakerajaan di daerah tersebut, sudah ada penganut agama Katolik berkat seorang penginjil bangsa Portugis, bernama Antonio de Payva.¹⁵

5. Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan* yang membahas tentang periodisasi Islam di Indonesia Harun Nasution membagi sejarah Islam pada tiga periode, yaitu periode klasik, pertengahan dan modern.¹⁶

Sementara itu kegiatan pendidikan Islam di Indonesia yang lahir dan tumbuh serta berkembang bersamaan dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka melihat Sejarah Islam di Indonesia dengan periodisasinya baik bagi pemikiran, isi maupun pertumbuhan organisasi dan kelembagaannya serta pola kebijakan pemerintah pertumbuhan organisasi dan

¹⁵ Samiang Katu, *Peta Islamisasi dan Kristenisasi di Sulawesi Selatan* h. 2.

¹⁶ Lihat, Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003), h. 48.

kelembagaannya serta, fase-fase peting yang dilalui, secara garis besar fase tersebut dapat dibagi menjadi beberapa.¹⁷

6. Masduki Baidlowi dan Rizal Mustary, Mahfud MD; *Bersih dan Membersihkan* yang membahas Konfigurasi politik, menurut Dr. Moh. Mahfud MD, SH, mengandung arti sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.¹⁸

Konfigurasi politik yang ada pada periode orde lama membawa bangsa Indonesia berada dalam suatu rezim pemerintahan yang otoriter dengan berbagai produk-produk hukum yang konservatif dan pergeseran struktur pemerintahan yang lebih sentralistik melalui ketatnya pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pada masa ini pula politik kepartaian sangat mendominasi konfigurasi politik yang terlihat melalui revolusi fisik serta sistem yang otoriter sebagai esensi feodalisme.

Sedangkan dibawah kepemimpinan rezim Orde Baru yang mengakhiri tahapan tradisional tersebut pembangunan politik hukum memasuki era lepas landas lewat proses Rencana Pembangunan Lima Tahun yang berkesinambungan dengan pengharapan Indonesia dapat menuju tahap kedewasaan dan selanjutnya berkembang menuju bangsa yang adil dan makmur. Indonesia menjalankan pemerintahan republic presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu DPR} yang anggota-

¹⁷Lihat, Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan.*, h. 49

¹⁸Lihat, Masduki Baidlowi dan Rizal Mustary, Mahfud MD; *Bersih dan Membersihkan*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 11.

anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan DPD yang anggota-anggotanya mewakili provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing.

Oleh sebab itu tidak disangsikan lagi bahwa pada saat itu ummat Islam yang diwadahi oleh dua organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama' mendesak dan mengusahakan adanya perwakilan dalam sistem pemerintahan yang ada mulai dari beberapa kabinet yang selalu mengalami pembubaran karena ketidakmampuannya mengatasi keadaan ketika membicarakan ideologi yang akan dianut Indonesia sebagai negara yang masih mencari jati dirinya sebagai negara yang baru merdeka yang pada saat itu selalu dimonopoli oleh tiga kekuatan besar, yaitu, Nasionalis, Islam dan Komunis.

Akhirnya tiga kekuatan tersebut dibentuk sebuah aliansi besar oleh Soekarno yang bernama Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis). Maka kemudian terbentuklah satu kekuatan yang menjadi landasan berfikir rakyat Indonesia pada saat itu hingga sekarang, yaitu Pancasila.

Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara pada saat itu tidaklah mulus, masih banyak pro dan kontra yang mengiringinya, terutama dari pihak Islam yang diwakili oleh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Persis. Akan tetapi pada akhirnya semua pihak menerima dengan hati yang lapang, karena ketika ditinjau lebih dalam hal-hal yang ada dalam Pancasila sangat tidak bertentangan dengan ajaran agama masing-masing.¹⁹

7. Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Yang membahas tentang Seirama dengan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hingga sekarang, maka sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Oleh karena itulah perjalanan sejarah pendidikan Islam sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1965 yang lebih

¹⁹Lihat, Masduki Baidlowi dan Rizal Mustary, Mahfud MD; *Bersih dan Membersihkan*, h. 13.

dikenal dengan masa orde lama akan berbeda dengan tahun 1965 sampai sekarang yang lebih dikenal dengan orde baru.²⁰

Di tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah Indonesia tetap membina pendidikan agama. Pembinaan agama tersebut secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta. Maka sejak itulah terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum.

Di satu pihak Departemen Agama mengelola semua jenis pendidikan agama baik di sekolah-sekolah agama maupun di sekolah-sekolah umum. Keadaan seperti ini sempat dipertentangkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan adanya pendidikan agama, terutama golongan komunis, sehingga ada kesan seakan-akan pendidikan agama khususnya Islam, terpisah dari pendidikan. Pendidikan agama diatur secara khusus dalam UU Nomor 4 tahun 1950 pada bab XII Pasal 20, yaitu:²¹

Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.

1. Cara penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri di atur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama. Dalam hubungan ini kementerian agama juga telah merencanakan rencana-rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam sebagai berikut:²²

8. Thohir Luth, M. Natsir; *Dakwah dan pemikirannya*, yang membahas Agama Kristen Katolik di Indonesia tampaknya benar-benar memanfaatkan kesempatan

²⁰Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta 2008.)

²¹Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. h. 39.

²²Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. h. 41.

dengan melakukan upaya Kristenisasi secara terbuka pasca-G. 30 S/PKI. Peluang ini ternyata berhasil merayu sebagian umat Islam untuk berpindah ke agama mereka.

Yang lebih demonstratif lagi adalah sebagai minoritas, mereka tidak segan-segan mendirikan gereja dan sekolah-sekolah di tengah-tengah lingkungan masyarakat mayoritas Muslim.

Mereka tidak segan-segan melakukan ajakan Kristenisasi dari rumah ke rumah kepada umat Islam dengan membagikan sejumlah materi yang menjadi kebutuhan masyarakat Islam. Alasannya sederhana, yaitu bantuan sosial dan kepedulian mereka terhadap nasib sebagian umat Islam yang memerlukan bantuan. Jika diteliti, sebenarnya kegiatan seperti ini tidak lebih dari peaceful aggressison ‘suatu penyerangan yang bersemboyan perdamaian’.

Dari segi ini, Kristen/Katolik melalui misionarisnya tampak sudah melampaui batas, sebab mereka sudah tidak mengindahkan lagi etika beragama, atau dengan pengertian lain, para misionaris Kristen/Katolik tampak demonstratif memasuki rumah-rumah orang Islam dengan berbagai dalih untuk menyampaikan pekabaran Injil.²³

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui sejarah masuknya Islam di Mambi.
- b. Untuk mengetahui perkembangan Islam di Mambi pada masa Orde Baru.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat perkembangan Islam di Mambi pada masa orde baru

2. Kegunaan Penelitian:

a. Kegunaan Ilmiah

1. Dapat di gunakan sebagai landasan teoritis dalam memahami sejarah masuknya Islam di Mambi.

²³Thohir Luth, M. Natsir; *Dakwah dan pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 120.

2. Dapat di gunakan sebagai landasan teoritis terkait perkembangan Islam pada masa Orde Baru.
3. Dapat di gunakan sebagai landasan teoritis terkait masalah faktor pendukung dan penghambat perkembangan islam di mambi pada masa Orde Baru.

b. Kegunaan Praktis:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu memberikan informasi kepada masyarakat tentang Perkembangan Islam di Mambi pada Masa Orde Baru
2. Hasil penelitian diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi agama islam dari semua segi yang ada di Mambi.
3. Memajukan pengetahuan Perkembangan Islam di Mambi pada Masa Orde Baru



BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Kondisi Islam di Indonesia pada Masa Orde Lama

Perdebatan Para pakar sejarah terkait masalah kedatangan Islam di Nusantara telah memberikan berbagai macam teori islamisasi yang bisa menjadi landasan untuk menjawab proses islamisasi di Nusantara. Berikut ini akan di jelaskan tentang Rekontruksi teori-teori islamisasi yang di lakukan di Nusantara. Pada Skripsi ini saya akan mengacu kepada teori-teori yang di bangun oleh Dr. Hj. Syamzan Syukur, M.Ag yang suda menjadi perdebatan para ahli Sejarah dalam bingkai teori yang dapat menjadi kerangka penelitian terkait masalah islamisasi yang di harapkan bisa membantu para peneliti dalam menganalisis setiap tahapan-tahapan islamisasi di Nusantara. Teori islamisasi yang di maksud adalah *proselitisasi* (kegiatan penyebaran Islam) teori *konvergensi* (persamaan antara budaya lokal deanga ajaran Islam sehingga Islam muda di terima) dan teori *Propagasi* (Penyebar luasan Islam).¹

1. Teori Proselitisasi

Teori proselitisasi yang di maksud dalam pembahasan ini adalah teori tentang kegiatan penyebaran agama Islam. Dalam kerangka ini, Islamisasi dalam pembahasan ini merujuk kepada teori islamisasi yang di kembangkan Hurgronje, dia mengatakan ada tiga elemen proses islamisasi yang mesti di bedakan, yaitu; masuknya Islam, pendudukan muslim dan pendirian kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. Teori yang sama juga di kembangkan oleh Noorduyn yaitu islamisasi dapat di artikan sebagai proses penyebaran agama Islam dari seorang atau beberapa orang Islam atau di artikan sebagai sejak datangnya pertama kali, penerimaan dan penyebaranya berlanjut dari waktu ke waktu sampai sekarang.

Maka berdasarkan teori di atas maka dapat di simpulkan bahwa proses penyebaran Islam (proselitisasi) yang terjadi di Nusantara terdiri atas tiga tahapan

¹Dr. Syamzan Syukur, M.Ag *Islam Literasi dan Budaya Lokal* :(Makassar). UIN Alauddin Makassar, 2014. H 73

yaitu peretama, kedatangan Islam (arrival), yang kedua penerimaan Islam (receive) dan yang ke tiga, pembentukan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam yang di tandai dengan Islam di terima sebagai agama resmi kerajaan (kingdom).²

2. Teori Konvergensi

Konvergensi di artiakan sebagai menuju satu titik pertemuan. Dengan demikian yang di maksud dengan teori konvergensi dalam penulisan skripsi ini adalah memudahkan ajaran Islam dengan budaya-budaya lokal yang memiliki persamaan, sehingga hanya dengan pendekatan adaptasi, Islam di terima secara damai (penetration pacifique) yang terjadi dalam waktu yang bisa terbilang singkat.

Menurut teori sebagian ahli, mengatakan bahwa faktor yang mengakibatkan Islam muda di terima oleh masyarakat dan kemudian bisa menjadi agama yang dominan dalam suatu daerah adalah karna adanya “kesamaan” antara bentuk Islam yang pertama kali datang ke Nusantara dengan sifat mistis dan sinkretis kepercayaan nenek moyang setempat. Oleh karena itu menurut teori ini, Islam tasawuf hampir secara alami di terima. Bahkan ada teori yang mengatakan bahwa Islam bisa hidup berdampingan secara damai dengan kepercayaan nenek moyang.

Teori yang pertama di atas di dukung oleh A.H Johns. Dalam teori ini Johns mengecilkan peran perdagangan dalam islamisasi. Menurut beliau, bahwa peranan para sufi atau pengembara, Islam di terima oleh sebagian besar penduduk Nusantara terjadi sejak abad ke 13. Faktor utama keberhasilan oleh para sufi dalam melakukan proses islamisasi di Nusantara adalah karna kemampuan mereka dalam menyajikan Islam dalam kemasan atraktif, dengan menekankan kesesuaian dengan Islam atau kontinitas, ketimbang perubahan dalam kepercayaan dan prakttek keagamaan lokal. Untuk menguatkan teorinya Johns mengambil banyak sumber lokal yang ada

²Dr. Syamzan Syukur, M.Ag *Islam Literasi dan Budaya Lokal* :(Makassar). UIN Alauddin Makassar, 2014. H 74-75

kaitannya dengan Islam di Nusantara dengan guru-guru pengembara dengan karakteristik sufi yang sangat kental.³

3. Teori Propagasi

Propagasi dapat di artikan sebagai penyebarluasan atau perkembangan. Dalam konteks islamisasi, teori propagasi ini atau teori penyebarluasan Islam adalah teori yang dapat di gunakan dalam melihat proses akulturasi (acculturation process). Islamisasi adalah proses penyebaran agama Islam, sehingga proses itu sendiri tidak bisa kita lepaskan dalam proses akulturasi, baik terkait dengan Islam dan budayanya di satu pihak dan dengan masyarakat setempat dengan budaya dan kepercayaan dan ataupun keagamaan mereka yang suda ada sebelumnya.⁴

Dengan demikian teori ini akan membatu kita dalam melihat sikap oleh masyarakat setempat husunya masyarakat yang suda memeluk islam yang tentu akan sangat di pengaruhi oleh karakteristik dari budaya lokal dengan prinsip yaang berkarakter Islam.

Bukannya tidak biasa jika suatu teori tertentu tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tandingan yang diajukan teori-teori lain.

Adapun mengenai periodisasi Islam di Indonesia Harun Nasution membagi sejarah Islam pada tiga periode, yaitu periode klasik, pertengahan dan modern.⁵

Sementara itu kegiatan pendidikan Islam di Indonesia yang lahir dan tumbuh serta berkembang bersamaan dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Oleh karena itu, dalam rangka melihat Sejarah Islam di Indonesia dengan periodisasinya baik bagi pemikiran, isi maupun pertumbuhan organisasi dan kelembagaannya serta pola kebijakan pemerintah pertumbuhan organsiasi dan

³Dr. Syamzan Syukur, M.Ag *Islam Literasi dan Budaya Lokal* :(Makassar). UIN Alauddin Makassar, 2014. H 83

⁴Dr. Syamzan Syukur, M.Ag *Islam Literasi dan Budaya Lokal* :(Makassar). UIN Alauddin Makassar, 2014. H 84

⁵Lihat, Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2003), h. 48.

kelembagaannya serta, fase-fase peting yang dilalui, secara garis besar fase tersebut dapat dibagi menjadi:⁶

1. Periode masuknya Islam ke Indonesia
2. Periode pengembangan melalui proses adaptasi
3. Periode pengembangan kerajaan-kerajaan Islam
4. Periode penjajahan Belanda
5. Periode penjajahan Jepang
6. Periode kemerdekaan I (Orde Lama)
7. Periode kemerdekaan II (Orde baru/pembangunan)

Melihat periodisasi di atas maka saya akan berusaha mengetahui macam-macam kebijakan yang dijalankan pada masa Orde Lama yang tentunya mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan Islam di Indonesia.

Karena pada saat itu, Islam memiliki batu sandunga yang tentunya sangat kuat dari agama Kristen saat itu, terutama yang berkaitan dengan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Madinah yang sangat berdampak luas terhadap integritas dan keutuhan Indonesia yang notabene baru mengalami kemerdekaan.

1. Situasi Politik pada Masa Orde Lama

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 negara Indonesia masuk dalam satu bingkai kehidupan baru sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh.

Dalam melihat perjalanan sejarahnya negara Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melalui berbagai rintangan dan juga terkadang ada ancaman yang tentu akan sangat membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Hasil dari sekian banyak hambatan adalah disintegrasi dan instabilisasi nasional yang terjadi sejak periode orde lama yang puncaknya terjadi dengan adanya pemberontakan PKI 30 September 1965

⁶Lihat, Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*.

sampai-sampai lahir Supersemar sebagai awal datangnya tonggak pemerintahan era Orde Baru yang merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama dimana masih terlihat kentalnya mekanisme, fungsi dan struktur politik yang tradisional berlandaskan ideologi sosialisme komunisme pada saat itu.

Konfigurasi politik, menurut Dr. Moh. Mahfud MD, SH,⁷ mengandung arti sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara ril terbagi atas dua konsep yang bertentangan secara pungsi, yaitu politik yang bersipat demokratis dan politik yang bersipat otoriter.

politik yang ada pada periode orde lama membawa negara Indonesia berada dalam suatu masa pemerintahan yang bersipat otoriter dengan adanya berbagai produk-produk hukum yang konservatif dan pergeseran struktur pemerintahan yang lebih transparan melalui ketatnya pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah daerah yang terbagi dalam beberapa provinsi dan kota kota.

Pada masa ini pula partai politik sangat mendominasi perkembangan politik yang dapat kita lihat melalui revolusi fisik dan sistem yang otoriter. Sedangkan pemerintahan yang di atur oleh kepemimpinan rezim Orde Baru yang mengakhiri pemerintahan yang bersifat tradisional itu terlihat dari pembangunan politik hukum memasuki zaman lepas landas melalui proses Rencana Pembangunan Lima Tahun yang berkesinambungan dengan tujuan negara ini dapat menuju era kedewasaan dan selanjutnya berkembang menjadi bangsa yang adil dan makmur di mata dunia dan masyarakat.⁸

Indonesia menjalankan proses pemerintahan republic presidensial multi partai yang demokratis. Sama yang di laksanakan oleh negara-negara demokrasi lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan legislatif dipegang oleh sebuah lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari dua badan yaitu DPR } yang

⁷Lihat, Masduki Baidlowi dan Rizal Mustary, Mahfud MD; *Bersih dan Membersihkan*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 11.

⁸Lihat,Masduki Baidlowi dan Rizal Mustary, Mahfud MD; *Bersih dan Membersihkan*, h. 13.

anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Partai Politik dan DPD yang anggota-anggotanya mewakili provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Setiap daerah diwakili oleh 4 orang yang dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya masing-masing agar pemimpin tersebut dapat menjalankan aspirasi masyarakat setempat dengan adanya pemilihan langsung tadi.

Oleh sebab itu tidak dapat di pungkiri lagi bahwa pada saat itu ummat Islam yang diwadahi oleh dua organisasi sosial kemasyarakatan sangat besar pada saat itu dan kemudian suda menjadi patokan oleh sebagian besar penduduk bangsa indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah mendesak dan mengusahakan adanya perwakilan dalam sistem pemerintahan yang ada mulai dari beberapa kabinet yang selalu mengalami pembubabaran karena ketidak mampuannya mengatasi keadaan ketika membicarakan ideologi yang akan dianut Indonesia sebagai negara yang masih mencari jati diriya sebagai negara yang baru merdeka yang pada saat itu selalu dimonopoli oleh tiga kekuatan besar, yaitu, Nasionalis, Islam dan Komunis.

Akhirnya tiga kekuatan tersebut dibentuk sebuah aliansi besar oleh Soekarno yang bernama Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis). Maka kemudian terbentuklah satu kekuatan yang menjadi landasan berfikir masyarakat Indonesia pada saat itu hingga sekarang, yaitu Pancasila. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara pada saat itu tidaklah muda tentu terjadi perdebatan ada yang pro dan ada juga kontrak, masih banyak pro dan kontra yang mengiringinya, terutama dari pihak Islam yang diwakili oleh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Persis. Akan tetapi pada akhirnya semua pihak menerima dengan hati yang lapang, karena ketika ditinjau lebih dalam hal-hal yang ada dalam Pancasila sangat tidak bertentangan dengan ajaran agama masing-masing yang di anut oleh masyarakat di Indonesia.

2. Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama

Setelah negara Indonesia merdeka, penyelesaian pendidikan agama Islam akhirnya mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga-lembanglembaga pendidikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Badan Pekerja

Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 27 Desember 1945, yang menyebutkan bahwa:

Madrasah dan pesantren adalah sekola sekola yang mengajarkan agama yang juga pada prinsipnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang tidak berurat akar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah mendapat perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah setempat dengan tujuan agar semua lembaga pendidikan ini mampu memberikan pembelajaran kepada masyarakat setempat agar mampu bersaing dengan sekola sekola umum.⁹

Kejadian yang seperti ini timbul karena kesadaran umat Islam yang telah sekian lama terpuruk dibawah kekuasaan penjajah yang gerak gerinya sangat terbatas. Sebab pada zaman penjajahan Belanda, pintu masuk pendidikan modern bagi umat Islam terbuka secara sangat sempit. Dalam hal ini minimal ada dua hal yang menjadi penyebabnya, yaitu:

1. Sikap dan kebijaksanaan pemerintah kolonial yang amat diskriminatif terhadap kaum muslimin.
2. Politik non kooperatif para ulama terhadap Belanda yang menfatwakan bahwa ikut serta dalam budaya Belanda, termasuk pendidikan modernnya, adalah salah satu bentuk penyelewengan agama. Mereka berpegang kepada salah satu hadits Nabi Muhammad saw yang artinya : “Barangsiapa menyerupai suatu golongan, maka ia termasuk ke dalam golongan itu”. Hadits tersebut melandasi sikap para ulama pada waktu itu.¹⁰ Itulah di antara beberapa faktor yang menyebabkan mengapa kaum muslimin Indonesia amat terbelakang dalam sesi intelektualitas ketimbang golongan lain. Sementara itu bila membicarakan organisasi Islam dan kegiatannya dibidang pendidikan. Sudah tentu tidak bisa terlepas dari membicarakan bentuk, sistem dan cita-cita bangsa Indonesia yang

⁹Lihat, Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam; Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 57.

¹⁰Moh. Mahfud MD..*Politik Hukum di Indonesia*. (Depok:PT Rajagrafindo 2012), h302

baru merdeka. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan yang sekian lama, terutama melalui berbagai organisasi pergerakan, baik sosial, agama maupun politik, senantiasa mendapat dukungan dari pemerintah. Pemerintah sadar bahwa sesungguhnya kekuatan negara terletak pada kesatuan dan persatuan bagi organisasi dan golongan, yang semuanya itu merupakan modal dasar dan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam pembangunan.

sehubungan dengan perjalanan sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hingga sekarang, maka sejarah kebijakan pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Oleh karena itulah perjalanan sejarah pendidikan Islam sejak Indonesia merdeka sampai tahun 1966 yang lebih dikenal dengan masa orde lama akan berbeda dengan tahun 1966 sampai 1998 yang lebih dikenal dengan masa Orde Baru.¹¹

Pergerakan pertama yang diambil oleh pemerintah Indonesia, adalah menyesuaikan pendidikan dengan tuntunan dan aspirasi rakyat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 yang berbunyi :

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

¹¹Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta2008.) h. 12

5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.¹²

Oleh sebab itu, pembatasan pemberian pendidikan disebabkan perbedaan agama, sosial, ekonomi dan golongan yang ada di masyarakat tidak dikenal lagi. Dengan demikian, setiap anak Indonesia dapat memilih kemana dia akan belajar, sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

3. Sistem Pendidikan pada Orde Lama

Di tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah Indonesia tetap membina pendidikan agama. Pembinaan agama tersebut secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta.

Maka sejak itulah terjadi semacam dualisme pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Di satu pihak Departemen Agama mengelola semua jenis pendidikan agama baik di sekolah-sekolah agama maupun di sekolah-sekolah umum.

Keadaan seperti ini sempat dipertentangkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak senang dengan adanya pendidikan agama, terutama golongan komunis, sehingga ada kesan seakan-akan pendidikan agama khususnya Islam, terpisah dari pendidikan.

Pendidikan agama diatur secara khusus dalam UU Nomor 4 tahun 1950 pada bab XII Pasal 20, yaitu:¹³

Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.

¹²<https://brainly.co.id/tugas/5790889> yang diakses pada tanggal 02 Januari 2019

¹³Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. h. 39.

1. Cara penyelenggaraan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri di atur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama. Dalam hubungan ini kementerian agama juga telah merencanakan rencana-rencana program pendidikan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan jenis-jenis pendidikan serta pengajaran Islam sebagai berikut:¹⁴

Pesantren klasik, semacam sekolah swasta keagamaan yang menyediakan asrama, yang sejauh mungkin memberikan pendidikan yang bersifat pribadi, sebelumnya terbatas pada pengajaran keagamaan serta pelaksanaan ibadah.

1. Madrasah diniyah, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan pengajaran tambahan bagi murid sekolah negeri yang berusia 7 sampai 20 tahun.
2. Madrasah-madrasah swasta, yaitu pesantren yang dikelola secara modern, yang bersamaan dengan pengajaran agama juga diberikan pelajaran-pelajaran umum.
3. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), yaitu sekolah dasar negeri enam tahun, di mana perbandingan umum kira-kira 1:2..
4. Suatu percobaan baru telah ditambahkan pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 6 tahun, dengan menambahkan kursus selama 2 tahun, yang memberikan latihan ketrampilan sederhana.
5. Pendidikan teologi agama tertinggi. Pada tingkat universitas diberikan sejak tahun 1960 pada IAIN. IAIN ini dimulai dengan dua bagian / dua fakultas di Yogyakarta dan dua fakultas di Jakarta.

B. Kondisi Islam di Indonesia Pada Masa Orde Baru

Setelah presiden Sukarno turun, secara otomatis rezim Orde Lama juga terhenti. Bersamaan dengan itu, lahirlah orde lain sebagai penerus perjuangan. Orde ini tidak lain adalah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto. Orde ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 32 tahun.

¹⁴Syafaruddin. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*.h. 41.

Dilihat dari segi fisik, Indonesia sangat berkembang dan maju. Di berbagai tempat (terutama di kota-kota besar) bangunan-bangunan besar dan mewah didirikan. Tapi jika ditinjau dari segi politik, maka Indonesia semakin menurun. Karena trias politika sebagai lembaga-lembaga tertinggi negara, yang berfungsi hanya lembaga eksekutif saja, sementara dua lembaga lainnya, baik itu lembaga legislatif dan yudikatif kurang atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Kedua lembaga ini tunduk di bawah lembaga eksekutif. Keduanya tidak lebih hanyalah sebagai robot yang gerak-geriknya diatur oleh lembaga eksekutif.¹⁵

Kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik. Terjadi ketegangan antara PKI dan tentara di masa-masa akhir kekuasaan Sukarno, kelompok-kelompok agama (terutama Islam dan Kristen) memutuskan untuk beraliansi dengan tentara. Sejak tahun 1961 hingga akhir kekuasaan Sukarno, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipegang dua orang Menteri.

Menteri Pendidikan Dasar dipegang oleh Prijono, seorang tokoh Murba yang dekat dengan PKI, sedangkan Menteri Pendidikan Tinggi dipegang oleh Sjarief Tajeb, seorang tokoh militer. Dengan dukungan kelompok agama, pada akhirnya Sjarief Tajeb dapat mewajibkan pendidikan agama di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, meskipun UU Pendidikan 1950 tidak mewajibkan pendidikan Agama.

Kudeta berdarah 30 September 1965 yang gagal telah mengubah arah politik bangsa Indonesia. Dalam perlawanan terhadap PKI yang dilakukan setelah kudeta, kaum Muslim dan Kristen bekerjasama bahu membahu dengan tentara. Pada sidang MPRS tahun 1966 diputuskan bahwa pendidikan agama wajib dilaksanakan dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Tetapi konversi besar yang terjadi itu disamping menggembirakan bagi sebagian tokoh agama, juga telah menjadi pemicu bagi timbulnya ketegangan dan konflik antara tokoh-tokoh Islam dan Kristen.

¹⁵Dra. Zuhairini, dkk. *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara 1997. Cet. 4) h 17

Banyaknya orang yang masuk Kristen (meski yang masuk Islam dan agama lain juga banyak) kemudian dibesar-besarkan oleh media Barat atau misionaris asing, membuat kalangan Muslim ketakutan dan merasa terancam. Inilah pangkal dari wacana ancaman kristenisasi di kalangan Islam yang berujung pada tuntutan untuk (1) membatasi penyiaran agama hanya kepada yang belum beragama, (2) agar pembangunan tempat ibadah mendapat persetujuan penduduk pusat.¹⁶

Kegiatan misi Kristen di Indonesia tampak meningkat setelah meletusnya pemberontakan komunis G.30 S/PKI. Keluarga orang-orang komunis yang ditangkap dan umat Islam yang miskin adalah sasaran utama mereka. Berpuluh-puluh ribu orang terpaksa masuk Kristen berkat bujukan-bujukan dan dana-dana misi tersebut. Organisasi-organisasi misionaris itu bermacam-macam dan cara yang mereka jalankan dalam kegiatannya bertentangan dengan Pancasila (kebebasan menganut agama).

Pada tahun 1967, misi tersebut mulai menunjukkan cara-cara yang sangat menyinggung perasaan umat Islam, yaitu mendirikan gereja-gereja dan sekolah-sekolah Kristen di lingkungan kaum Muslim. Keadaan yang demikian itu telah menimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, yaitu perusakan gereja di Meulaboh, Aceh, pada bulan Juni 1967, perusakan gereja di Ujung pandang (Makassar) bulan Oktober 1967, dan perusakan sekolah Kristen di Palmerah, Slipi, Jakarta.¹⁷

Agama Kristen Katolik di Indonesia tampaknya benar-benar memanfaatkan kesempatan dengan melakukan upaya Kristenisasi secara terbuka pasca-G. 30 S/PKI. Peluang ini ternyata berhasil merayu sebagian umat Islam untuk berpindah ke agama mereka.

¹⁶Nursyirwan, *Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia setelah Kemerdekaan*, (Didaktika Jurnal Kependidikan Vol. 4 No. 2 November 2009), h. 217.

¹⁷M. Natsir, *Mencari Modus Vivendi antar Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Media Dakwah, 1980), h. 7.

Yang lebih demonstratif lagi adalah sebagai minoritas, mereka tidak segan-segan mendirikan gereja dan sekolah-sekolah di tengah-tengah lingkungan masyarakat mayoritas Muslim. Mereka tidak segan-segan melakukan ajakan Kristenisasi dari rumah ke rumah kepada umat Islam dengan membagikan sejumlah materi yang menjadi kebutuhan masyarakat Islam.

Alasannya sederhana, yaitu bantuan sosial dan kepedulian mereka terhadap nasib sebagian umat Islam yang memerlukan bantuan. Jika diteliti, sebenarnya kegiatan seperti ini tidak lebih dari peaceful aggression ‘suatu penyerangan yang bersemboyan perdamaian’. Dari segi ini, Kristen/Katolik melalui misionarisnya tampak sudah melampaui batas, sebab mereka sudah tidak mengindahkan lagi etika beragama, atau dengan pengertian lain, para misionaris Kristen/Katolik tampak demonstratif memasuki rumah-rumah orang Islam dengan berbagai dalih untuk menyampaikan pekabaran Injil.¹⁸

1. Kebijakan Pendidikan Islam Masa Orde Baru

Zaman pemerintah Orde Baru, pendidikan diwarnai oleh politik yang bersifat sentralistik, dengan titik tekan pada pembangunan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang didukung oleh kekuatan birokrasi pemerintah, angkatan bersenjata, dan konglomerat. Dengan politik yang bersifat sentralistik ini, seluruh masyarakat harus menunjukkan monoloyalitas yang tinggi, baik secara ideologis, politis, birokrasi, maupun hal-hal yang bersifat teknis yang di anggap berkaitan dengan itu.¹⁹

Dari sisi ideologi, pendidikan telah cukup mendapat tempat dari pendiri bangsa. Terbukti dengan dimasukkannya pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam Pembukaan UUD 1945, yang notabene-nya tidak dapat diubah dan dianggap sebagai landasan perjuangan bangsa yang sakral. Sebelum pemerintahan

¹⁸Thohir Luth, M. Natsir; *Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 120.

¹⁹Nata, Abuddin; *Sejarah pendidikan Islam*. (Jakarta: 2011) h. 12

Presiden Suharto, masalah pendidikan nasional telah memperoleh cukup banyak perhatian dari elite politik yang ada.²⁰

Jika kita melihat sejarah, proklamator Bung Hatta merupakan salah satu tokoh yang gencar menyuarakan pentingnya pendidikan nasional bagi kemajuan bangsa sejak zaman kolonialisme. Yang lebih menyedihkan dari kebijakan pemerintahan Orde Baru terhadap pendidikan adalah sistem doktrinisasi. Yaitu sebuah sistem yang memaksakan paham-paham pemerintahan Orde Baru agar mengakar pada benak anak-anak. Bahkan dari sejak Sekolah Dasar sampai pada tingkat Perguruan Tinggi diwajibkan untuk mengikuti penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) yang berisi tentang hapalan butir-butir Pancasila.²¹

Proses indoktrinasi ini tidak hanya menanamkan paham-paham Orde Baru, tetapi juga sistem pendidikan masa Orde Baru yang menolak segala bentuk budaya asing, baik itu yang mempunyai nilai baik ataupun mempunyai nilai buruk. Dengan demikian, pendidikan pada masa Orde Baru bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, apalagi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, tetapi malah mengutamakan orientasi politik agar semua rakyat itu selalu patuh pada setiap kebijakan pemerintah.

Putusan pemerintah adalah putusan yang adiluhung dan tidak boleh dilanggar. Itulah doktrin Orde Baru pada sistem pendidikan kita. Indoktrinasi pada masa kekuasaan Suharto ditanamkan dari jenjang Sekolah Dasar sampai pada tingkat pendidikan tinggi, pendidikan yang seharusnya mempunyai kebebasan dalam pemikiran. Pada masa itu, pendidikan diarahkan pada pengembangan militerisme yang militan sesuai dengan tuntutan kehidupan suasana perang dingin. Semua serba kaku dan berjalan dalam sistem yang otoriter.²²

²⁰Nata, Abuddin*sejarah pendidikan Islam*.

²¹Nata, Abuddin*sejarah pendidikan Islam*.

²²Nata, Abuddin*Sejarah pendidikan Islam*. h. 12-13

Pendidikan adalah pilar utama berdirinya sebuah bangsa. Pada dasarnya pendidikan merupakan usaha untuk merancang masa depan umat manusia sebagai generasi yang memajukan sebuah bangsa. Dalam konsep dan implentasi pendidikan harus memperhitungkan berbagai faktor.

Demikian juga konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia yang tidak pernah lepas dari unsur politik dan kebijakan pemerintah. Semangat zaman pada masa Orde Baru adalah semangat melawan dan membebaskan. Semangat ini tumbuh dengan kuat, akan tetapi semangat ini diperlemah secara sistematis dan akhirnya menjadi lumpuh sama sekali.²³

Semangat zaman yang ada selama Orde Baru ialah semangat “mengabdikan penguasa”. Baru setelah muncul suatu “generasi baru” yaitu kelompok mahasiswa yang tidak lagi mau menerima pandangan-pandangan rezim Orde Baru mulailah muncul sikap melawan. Para mahasiswa mendobrak rezim Orde Baru ini dengan memelopori suatu sikap politik yang merupakan ulangan dari sikap para perintis kemerdekaan, yaitu menentang segenap kesewenang-wenangan dan ketidakadilan.²⁴

Ahkirnya, kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru mengarah pada penyeragaman, baik cara berpakaian maupun dalam segi pemikiran. Hal ini menyebabkan generasi bangsa kita adalah generasi yang mandul. Maksudnya, miskin ide dan takut terkena sanksi dari pemerintah karena semua tindakan bisa-bisa dianggap subversif. Tindakan dan kebijakan pemerintah Orde Baru-lah yang paling benar. Semua wadah-wadah organisasi baik yang tunggal maupun yang majemuk dibentuk pada budaya homogen bahkan partai politik pun dibatasi. Hanya tiga partai yang berhak mengikuti Pemilu.

Namun, pada waktu itu tidak ada yang berani bicara. Masa itu tidak ada lagi perbedaan pendapat sehingga melahirkan disiplin ilmu yang semu dan melahirkan generasi yang latah dan penakut.

²³Nata, *Abuddin Sejarah Pendidikan Islam*.h. 13-14

²⁴Mochtar Buchori, *Peranan Pendidikan dalam Pembentukan Budaya Politik di Indonesia, Dalam Quo Vadis Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, t.t), h. 29.

Pada masa pemerintahan Orde Baru pertumbuhan ekonomi tidak berakar pada ekonomi rakyat dan sumber daya domestik, melainkan bergantung pada utang luar negeri sehingga menghasilkan sistem pendidikan yang tidak peka terhadap daya saing dan tidak produktif.

Pendidikan tidak mempunyai akuntabilitas sosial karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam merancang sistem pendidikan karena semua serba terpusat. Dengan demikian, pendidikan pada masa itu mengingkari pluralisme masyarakat sehingga sikap teloransi semakin berkurang, yang ada adalah sikap egoisme.

Perkembangan pendidikan Islam masa Orde Baru setahap demi setahap mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Di antaranya lembaga- lembaga pesantren mulai mendirikan madrasah dalam sistem pendidikannya. Dalam sistem ini jenjang-jenjang pendidikan terbagi menjadi Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Sistem madrasah ini mendorong perkembangan pesantren sehingga jumlahnya meningkat pesat.

Pada tahun 1958/1959 lahir Madrasah Wajib Belajar yang memiliki hak dan kewajiban seperti sekolah negeri. Selanjutnya, di tahun 1965, berdasarkan rumusan Seminar Pondok Pesantren di Yogyakarta disepakati di pondok pesantren perlu dimasukkan pelajaran keterampilan seperti: pertanian dan pertukangan.²⁵

Keadaan inilah yang mendorong tokoh-tokoh Islam menuntut agar madrasah dan pendidikan keagamaan dimasukkan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Reaksi terhadap sikap pemerintah yang mendiskriminasikan menjadi lebih keras dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972, yang kemudian diperkuat dengan Intruksi Presiden No. 15 Tahun 1974. Kepres dan Inpres ini isinya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari pendidikan nasional. Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan Inpres itu sebagai manuver

²⁵Hasbullah..*Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*. (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada2001.) h. 30

untuk mengabaikan peran dan manfaat madrasah yang sejak zaman penjajahan telah diselenggarakan umat Islam.

Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam dua dekade terakhir 1980-an sampai dengan 1990-an. Lembaga pendidikan dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.²⁶

Pada awal-awal masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan tentang madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan Orde Lama. Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi baru sebagai lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah pengawasan Menteri Agama.

Dalam dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat keberadaannya. Namun, di awal-awal tahun 1970-an justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang ditempuh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan berupa Keputusan Presiden Nomor 34 tanggal 18 April tahun 1972 tentang tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan. Isi keputusan ini mencakup tiga hal:

1. Menteri pendidikan dan kebudayaan bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan umum dan kebijakan.
2. Menteri tenaga kerja bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan dan latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri.
3. Ketua lembaga administrasi negara bertugas dan bertanggung jawab atas pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai negeri.

Perkembangan pendidikan agama di Indonesia pada masa Orde Baru ditandai dengan selesainya bangsa Indonesia dalam menumpas G30 S/PKI (1965-1966). Sejak

²⁶Rossi, *Pendidikan Islam Masa Orde Baru*, <http://coretan-rossi.blogspot.com/2011/06pendidikan-islam-masa-orde-baru.html>, diakses 19 Desember 2018

saat itu pula pemerintah Indonesia semakin menunjukkan perhatiannya terhadap pendidikan agama, sebab disadari dengan bermentalkan agama yang kuatlah bangsa Indonesia akan terhindar dari paham komunisme. Untuk merealisasikan cita-cita tersebut, sidang umum MPRS tahun 1966 berhasil menetapkan TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang membahas tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pasal 1 menjelaskan "Menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai dengan universitas-universitas negeri". Dengan demikian, sejak tahun 1966 pendidikan agama menjadi materi pelajaran wajib dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi Umum Negeri di seluruh Indonesia. TAP MPRS inilah yang menjadi landasan pertama kali bagi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran agama di seluruh sekolah di Indonesia pada zaman Orde Baru.²⁷

Setelah pemilu 1973, secara politik pemerintah Orde Baru mengonsolidasikan agenda-agenda pembangunan pendidikan melalui Tap MPR- RI No. IV/MPR 1973 yang berbunyi:

1. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam sekolah dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup.
2. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah negara, Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berpancasila dan untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kreatifitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945.

²⁷<http://anggiwidya.wordpress.com/2012/03/01/peristiwa-g30spki/> diakses 19 Desember 2018

Salah satu momentum nasional yang mempengaruhi iklim pendidikan nasional, selain ketetapan MPR 1978 dan 1983 adalah keluarnya kebijakan pendidikan P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) serta munculnya pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Kedua ketetapan MPR tersebut sangat memengaruhi iklim politik nasional yang mempengaruhi dunia pendidikan. Ketetapan MPR 1983 ini kemudian menjadi landasan munculnya pelajaran baru, yakni Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) sejak SD. Jadi ada beberapa pelajaran baru, di antaranya masuknya pengajaran P4 dalam bentuk penataran di SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi, serta pelajaran PMP dan PSPB dari SD-SMA dengan pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) dan Bahasa Daerah.

Pada awal tahun 1980-an, pernah ada usul agar pemerintah memasukkan kurikulum perbandingan agama untuk di sekolah-sekolah lanjutan atas; SMU dan Madrasah Aliyah, atau yang setingkat. Namun, usul ini diprotes oleh beberapa kalangan Muslim karena dianggap dapat merusak dan melemahkan iman para anak didik. Pendidikan Agama dimasukkan ke dalam program pendidikan inti, sebagai mata pelajaran wajib bagi semua siswa SMA bersama-sama dengan 14 mata pelajaran lain: Pendidikan Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, Bahasa dan Sastra Indonesia, Geografi, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Pendidikan Kesenian, Pendidikan Keterampilan, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Sejarah, dan Bahasa Inggris.

Menteri P dan K, Nugroho Notosusanto yang menggantikan Daud Yusuf memberlakukan kebijakan baru berupa keharusan setiap murid baru untuk menandatangani surat pernyataan mengenai pendidikan agama yang akan diikuti. Argumen yang dikemukakan saat itu adalah mengidentifikasi kebutuhan (need assesment) guru agama di masing-masing agama.

Kebijakan lainnya adalah menyangkut pakaian jilbab bagi siswi yang beragama Islam. Banyak sekolah yang secara tegas melarang pengenaaan pakaian tersebut bagi murid perempuan, seperti yang menimpa 19 siswi kelas I–III SMA I

Jakarta pada tahun 1985. Pada awalnya sekolah menjatuhkan sanksi skors terhadap siswi yang mengenakan jilbab dengan alasan melanggar tata tertib sekolah yang telah ditandatangani oleh orangtua murid sewaktu anaknya mau masuk ke sekolah tersebut yakni anaknya akan menaati semua peraturan sekolah termasuk pakaian seragam.

Namun, setelah tidak ada kata sepakat dengan orangtua, para siswi itu kemudian dipindahkan ke sekolah lain dan uang seragam mereka pun dikembalikan, mereka harus beli pakaian seragam baru di tempat lain.

Ketentuan pakaian seragam itu sendiri didasarkan pada SK Dirjen Dikdasmen No. 052/C/Kep./D.82 yang disusul dengan Peraturan Pelaksanaan No.18306/C/D.83 tentang Pedoman Pakaian Seragam Anak Sekolah (PSAS). Salah satu poin dalam SK tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi para kepala sekolah (negeri) untuk mengambil kebijakan di tingkatan sekolah adalah poin yang menyatakan "Pelaksanaan pakaian seragam di sekolah-sekolah, bagi beberapa siswi yang melakukan penyimpangan karena keyakinan agama (bila ada), diberlakukan secara persuasif, edukatif, dan manusiawi".²⁸

2. Keberhasilan-keberhasilan Pendidikan Islam pada Masa Orde Baru

Masa Orde Baru ini mencatat banyak keberhasilan, di antaranya adalah:

1. Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga universitas (TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966).
2. Madrasah mendapat perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum.
3. Pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan.
4. Berdirinya MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tahun 1975.
5. Pelarangan SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980-an.

²⁸*Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, <http://istanailmu.com/2011/04/08/pendidikan-islam-dalam-sistem-pendidikan-nasional/html>, diakses 19 Desember 2018

6. Pemerintah memberi izin pada pelajar Muslimah untuk memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah negeri sebagai ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka.
7. Terbentuknya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Terbentuknya UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.
9. Adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI).
10. Dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam.
11. Pendirian BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Sadaqoh).
12. Pemberlakuan label halal atau haram oleh MUI bagi produk makanan dan minuman pada kemasannya, terutama bagi jenis olahan.
13. Pemerintah memfasilitasi penyebaran da'i ke daerah terpencil dan lahan transmigrasi.
14. Mengadakan MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur'an).
15. Mengadakan peringatan hari besar Islam di Masjid Istiqlal.
16. Mencetak dan mengedarkan mushaf Al-Quran dan buku-buku Agama Islam yang kemudian diberikan ke mesjid atau perpustakaan Islam.
17. Terpusatnya jama'ah haji di asrama haji.
18. Penayangan pelajaran Bahasa Arab di TVRI.
19. Berdirinya MAN PK (Program Khusus).
20. Mengadakan pendidikan pascasarjana untuk Dosen IAIN baik ke dalam maupun luar negeri. Khusus mengenai kebijakan ini, Departemen Agama telah membuka program pascasarjana IAIN sejak 1983 dan join cooperation dengan negara-negara Barat untuk studi lanjut jenjang Magister maupun Doktor.²⁹

3. *Kurikulum Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru*

Upaya dalam pengaturan dan pembaruan kurikulum madrasah dikembangkan dengan menyusun kurikulum sesuai dengan konsensus yang ditetapkan. Khusus

²⁹*Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional*, <http://istanailmu.com/2011/04/08/pendidikan-islam-dalam-sistem-pendidikan-nasional/html>, diakses 19 Desember 2018

untuk MA, waktu untuk setiap mata pelajaran berlangsung 45 menit dan memakai semester. Sementara itu, jenis program pendidikan dalam kurikulum madrasah terdiri dari program inti dan program pilihan.

Pengembangan kedua program kurikulum ini terbagi menjadi dua bagian yaitu: pendidikan agama, terdiri atas: Al-Quran Hadits, Aqidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab, dan pendidikan umum antara lain: PMP, PSPB, Bahasa dan Sastra Indonesia, Pengetahuan Sains, Olahraga dan Kesehatan, Matematika, Pendidikan Seni, Pendidikan Keterampilan, Bahasa Inggris (MTS dan MA), Geografi (MA), Biologi (MA), Fisika (MA) dan kimia (MA).

Sebagai esensi dari pembakuan kurikulum di sekolah umum dan madrasah ini memuat antara lain:

1. Kurikulum sekolah dan madrasah terdiri atas program inti dan program pilihan.
2. Program inti dalam rangka memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah, dan program inti sekolah umum dan madrasah secara kualitatif sama.
3. Program khusus (pilihan) diadakan untuk memberikan bekal kemampuan siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi bagi Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah.
4. Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah umum dan madrasah mengenai sistem kredit semester, bimbingan karir, ketuntasan belajar.
5. Hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kurikulum akan diatur bersama oleh kedua departemen yang bersangkutan.

Di antara rumusan kurikulum 1984 memuat hal strategis sebagai berikut:

1. Program kegiatan kurikulum madrasah (MI, MTS dan MA) tahun 1984 dilakukan melalui kegiatan interkurikuler, kokuler, dan ekstrakurikuler, baik dalam program inti maupun program pilihan.
2. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan memerhatikan keserasian antara cara seseorang belajar dengan apa yang dipelajarinya.

3. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh untuk peningkatan proses dan hasil belajar, serta pengelolaan program.

Secara formal, madrasah sudah menjadi sekolah umum yang menjadikan agama sebagai ciri khas kelembagaannya.

Di satu pihak materi pengetahuan umum bagi madrasah secara kuantitas dan kualitas mengalami peningkatan, tetapi di pihak lain penguasaan murid terhadap pengetahuan agama menjadi serba tanggung. Menyadari kondisi seperti itu muncul keinginan pemerintah untuk mendirikan MA yang bersifat khusus yang kemudian dikenal dengan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK).³⁰

Awal dari Orde Baru pun bergulir di bawah kepemimpinan Jenderal Suharto, nama Orde Baru diciptakan demi membedakan dengan pemerintahan Orde Lama yang di bawah Presiden Sukarno. Perbedaan nama rezim itu bukan saja secara harfiah atau perbedaan sang pemimpin orde, tetapi juga berimplikasi kepada pergeseran secara fundamental misi dari pemerintah serta metode yang tepat untuk mencapai misi tersebut.

Diawali dari proses pengertian sejumlah madrasah oleh pemerintah RI pada masa Orde Baru yaitu pada tahun 1967, mulai dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, selangkah telah terlihat kebijakan pemerintah yang berkontribusi positif terhadap pendidikan Islam kemudian disusul dengan munculnya SKB 3 menteri tahun 1975 tentang peningkatan mutu madrasah dengan diakuinya ijazah madrasah yang memiliki nilai yang sama dengan ijazah nilai sekolah umum. Secara formal madrasah sudah menjadi sekolah umum yang menjadikan agama sebagai ciri khas kelembagaannya.

Kehidupan beragama dan pendidikan agama khususnya makin memperoleh tempat yang kokoh dalam struktur organisasi pemerintahan dan dalam masyarakat pada umumnya. Dalam sidang-sidang MPR yang menyusun GBHN pada tahun 1973-

³⁰Rossi, *Pendidikan Islam Masa Orde Baru*, <http://coretan-rossi.blogspot.com/2011/06/pendidikan-islam-masa-orde-baru.html>, diakses 19 Desember 2018

1978 dan 1983 selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua tingkat (jenjang) pendidikan. Bahwa bangsa dan pemerintah Indonesia bercita-cita menuju kepada apa yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia dan masyarakat Indonesia seutuhnya. Hal ini berarti adanya keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara pembangunan bidang jasmani dan rohani, antara bidang material dan spiritual, antara bekal keduniaan dan ingin berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama manusia dan dengan lingkungan hidupnya secara seimbang. Pembangunan tersebut menjadi pangkal tolak pembangunan bidang agama.

Adapun sasaran pembangunan di bidang jangka panjang adalah terbinanya iman bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam kehidupan yang selaras, seimbang, dan serasi antara lahiriah dan rohaniah, mempunyai jiwa yang dinamis dan semangat gotong royong sehingga bangsa Indonesia sanggup meneruskan perjuangan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.³¹

Agama mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dan strategis. Peran utama agama sebagai landasan spiritual, moral, dan etika dalam pembangunan nasional. Agama juga berpengaruh untuk membersihkan jiwa manusia dan kemakmuran rakyat. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami dan diamalkan oleh setiap individu, warga, dan masyarakat hingga akhirnya dapat menjiwai kehidupan bangsa dan negara.

Sejak tahun 1966 terjadi perubahan besar pada bangsa Indonesia, baik itu menyangkut kehidupan sosial- agama maupun politik.

Pada Orde Baru tekad yang diemban, yaitu kembali pada UUD 1945 dan melaksanakannya secara murni dan konsekuen, sehingga pendidikan agama memperoleh tempat yang kuat dalam struktur pemerintahan.

³¹Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 156-157.

Perkembangan Islam pada masa Orde Baru berkembang dengan pesat, begitu juga dengan perkembangan agama lain. Saking bebasnya, muncullah kristenisasi dengan bentuk bakti sosial terhadap umat muslim yang membutuhkan bantuan. Dibalik itu, para misionaris mengajak umat Muslim untuk masuk agama mereka.

Akibat dari sikap tersebut, timbul beberapa pemberontakan dengan memusnahkan gereja-gereja yang dibangun di tengah pemukiman umat Islam. Pengajaran Islam berkembang dengan munculnya beberapa program pendidikan Islam, antara lain adanya program pelatihan bahasa Arab yang disiarkan di TVRI, didirikannya MUI, didirikannya MAN PK, program penyebaran da'i, dan lain-lain.

Beberapa kebijakan pendidikan Islam masa Orde Baru membawa perubahan terhadap pendidikan Islam. Lahirnya SKB Tiga Menteri yang menyatakan bahwa alumni madrasah bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah umum. Sehingga kurikulum madrasah pun harus diseimbangkan dengan kurikulum sekolah umum. Pada masa Orde Baru inilah pendidikan agama menjadi pelajaran wajib mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai universitas.³²

Lembaga pendidikan Islam seperti: pesantren dan madrasah telah sejajar dengan sekolah umum. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan baik di pesantren maupun madrasah harus seimbang dengan kurikulum sekolah umum. Sehingga lulusan pesantren atau madrasah bisa bersaing dengan lulusan sekolah umum. Bahkan lulusan pesantren atau madrasah harus mempunyai kelebihan dalam pendidikan agama. Hendaknya dalam lembaga pendidikan Islam tradisional (pesantren) tidak hanya belajar agama saja akan tetapi dimasukkan pengajaran keterampilan seperti: bertani, berternak, dan berkebun sebagai bekal bagi kehidupan para santri

³²Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Perkembangan Islam pada Masa Orde Baru di Mambi Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat merupakan suatu penelitian sejarah karena penelitian ini diarahkan untuk meneliti, mengungkapkan, dan menjelaskan peristiwa masa lampau, metode yang di gunakan adalah metode sejarah yang bersifat kualitatif.

Tujuan dari penelitian sejarah ini yaitu untuk menemukan dan mendeskripsikan secara analisis serta menafsirkan bagaimana latar belakang sejarah Perkembangan Islam di Mambi pada Masa Orde Baru. Penelitian sejarah merupakan penelitian yang sifatnya *nirpragmatis*, dalam artian bahwa yang diteliti adalah peristiwa atau kejadian masa lampau. Maka perlu diingat, bahwa dalam penelitian sejarah bukan aspek kurang atau lebih yang ingin dicari, akan tetapi fakta yang harus diungkap.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat dan yang menjadi pusat objek Opservasinya adalah masyarakat, tokoh agama dan pemerintah yang ada di beberapa desa dan juga kelurahan Mambi.

B. Pendekatan penelitian

Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitan ini yaitu:

a. Pendekatan Histori

Dalam penelitian ini penulis melakukan suatu pendekatan yang sesuai dengan studi penelitian sejarah. Tentu dalam penelitian sejarah pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan histori atau pendekatan sejarah. Pendekatan histori atau Pendekatan sejarah merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam

melakukan penelitian tentang objek sejarah, agar mampu mengungkap banyak dimensi dari peristiwa tersebut.¹

b. Pendekatan Politik.

Sejarah identik dengan politik karna jalannya sejarah selalu ditentukan oleh kejadian politik.²

Penelitian ini memfokuskan obyek penelitiannya pada Perkembangan Islam pada Masa Orde Baru di Mambi Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat, penulis merasa perlu menggunakan pendekatan politik dalam penelitian ini agar peneliti lebih objektif dalam mengungkapkan atau menginterpretasikan hubungan politik antara Mambi dengan daerah daerah lainnya di mandar karna dari situ kita dapat mengetahui siapa yang berperan dalam penyebaran *dan perkembangan islam di mambi*.

C. Sumber Data

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka,³ melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat.

Adapun data kualitatif meliputi :

1. Data tentang gambaran umum mengenai objek penelitian
2. Data lain yang tidak berupa angka

Adapun jenis-jenis dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari informan yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perkembangan islam yang ada di mambi.

¹Rahmad, dkk. *Buku Daras Praktek Penelusuran Sumber Sejarah dan Budayah* (Cet. 1; Jakarta: Gunadarma Ilmu), h. 135

²Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 17.

³Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1987), h. 66.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain : Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Mambi, Dan beberapa Tokoh Masyarakat, Tokoh agama dan Tokoh Pendidikan Yang ada di beberapa desa di Kecamatan Mambi.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Metodenya adalah.

1. Metode observasi.
2. Metode interview.
3. Metode wawancara.

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah salah satu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan baru tergolong sebagai teknik mengumpulkan data, jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria berikut:

- a. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis.
- b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan.
- c. Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja.
- d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol atas validitas dan reliabilitasnya.

Penggunaan pengamatan langsung sebagai cara mengumpulkan data mempunyai beberapa keuntungan:

1. Dengan cara pengamatan langsung terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal, perilaku, Pertumbuhan dan sebagainya, sewaktu kejadian tersebut berlaku atau sewaktu perilaku tersebut terjadi. Dengan cara pengamatan, data yang langsung mengenai perilaku yang tipikal dari objek dapat dicatat segera dan tidak menggantung data dari ingatan seseorang.
2. Pengamatan langsung dapat memperoleh data dari subjek baik tidak dapat berkomunikasi secara verbal atau yang tak mau berkomunikasi secara

verbal. Adakalanya subjek tidak mau berkomunikasi secara verbal dengan enumerator atau peneliti, baik karena takut, karena tidak ada waktu atau karena enggan. Dengan pengamatan langsung, hal di atas dapat ditanggulangi..

Kelemahan dari pengamatan langsung adalah:

1. Kadang kala diperlukan waktu menunggu yang lama untuk memperoleh pengamatan langsung terhadap satu kejadian.
2. Pengamatan terhadap suatu fenomena yang lama tidak dapat dilakukan secara langsung.

Metode wawancara.

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide..

Beberapa hal dapat membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari, antara lain:

Pewawancara dan responden biasanya belum saling mengenal sebelumnya; Responden selalu menjawab pertanyaan:

Pewawancara selalu bertanya:

Pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus selalu bersifat netral.

E. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Penulisan peristiwa masa lampau dalam bentuk peristiwa atau kisah sejarah supaya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, harus melalui prosedur kerja sejarah. Secara sederhana penulisan sejarah dapat dijelaskan beberapa tahapan kerja, yaitu heuristik, Kritik, Interpretasi dan historiografi.⁴

⁴Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), h. 86.

a. Heuristik

Heuristik merupakan suatu keterampilan dalam menemukan sumber.⁵ Dalam penelitian ini penulis dalam memperoleh sumber didapatkan melalui data Wawancara, kepustakaan, dan observasi.

1. Wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan individu maupun wawancara dengan kelompok. Wawancara juga dapat dilakukan secara tidak langsung, melalui kuesioner dengan pertanyaan maupun tidak terstruktur.
2. Kepustakaan adalah studi mengenai sumber-sumber tertulis berupa naskah, buku, serta jurnal yang diterbitkan. Untuk memudahkan pencarian dapat menggunakan katalog. Berikutnya yaitu dengan menggunakan buku yang menjadi referensi, selain itu peneliti juga bisa mengetahuinya dari melihat catatan kaki (*footnote*)
3. Observasi (pengamatan) dilakukan secara langsung di lapangan terhadap objek.

b. Kritik Sumber

Kritik sumber yang biasa disebut juga penilaian data adalah tahap penyaringan sumber yang diperoleh. Setelah data terkumpul maka perlu diadakan verifikasi data dan kritik untuk memperoleh keabsahan data yang telah diperoleh.

Dalam melakukan sebuah kritik sumber ada dua hal yang perlu diperhatikan, yang pertama kritik eksternal (otentisitas). Dalam hal ini berkaitan dengan kritik tentang keabsahan keaslian sumber. Kedua kritik internal (kredibilitas) dalam hal ini berkaitan dengan kritikan keabsahan tentang kebenaran sumber.⁶

Kritik sumber terbagi atas dua yaitu:

1. Kritik intern dilakukan untuk menilai kelayakan atau kredibilitas sumber. Kredibilitas sumber biasanya mengacu pada kemampuan sumber untuk

⁵Dudung Abdurrahman, M. Hum. *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)h. 55.

⁶Dudung Abdurrahman, M. Hum. *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)h. 37

mengungkap kebenaran suatu peristiwa sejarah. Kemampuan sumber meliputi kompetensi kedekatan atau kehadiran sumber dalam peristiwa sejarah.

2. Kritik ekstern di lakukan untuk mengetahui sejauh mana keabsahan dan autentisitas sumber. Kritik terhadap autentisitas sumber tersebut misalnya dengan melakukan pengecekan tanggal penerbitan dokumen, pengecekan bahan yang berupa kertas atau tinta apakah cocok dengan masa di mana bahan semacam itu biasa di gunakan atau di produksi. Kritik sumber dapat menjawab tiga hal mengenai sumber:

1. Apakah sumber itu merupakan sumber yang kita butuhkan?
2. Apakah itu merupakan sumber asli atau Salinan (turunan)?
3. Apakah sumber itu masi utuh atau suda mengalami perubahan?

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan penafsiran dari data-data yang telah diperoleh setelah melalui proses kritik sumber dan pengklasifikasian data secara otentik.⁷

1. Interpretasi analisis. Yaitu dengan menguraikan fakta satu persatu sehingga memperluas perspektif terhadap fakta itu. Dari situlah dapat di Tarik sebuah kesimpulan.
2. Interpretasi sintetis. Yaitu mengumpulkan beberapa fakta dan menarik kesimpulan dari fakta fakta tersebut⁸

d. Historiografi

Historiografi sebagai tahap akhir dalam metode penulisan sejarah, merupakan cara penulis untuk menyajikan hasil penelitian yang telah dilakuakn dalam bentuk tulisan, dengan menggunakan imajinasi historis.

Pengisahan sejarah itu jelas sebagai suatu kenyataan subjektif, karena setiap orang atau setiap generasi dapat mengarahkan sudut pandangannya terhadap apa yang

⁷Syamsues Salihima, *Dalam Rihlah Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, Diterbitkan Oleh Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar 2015.h. 37

⁸M. Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah Sebua Pengantar*. (Jakarta): Kemcana 1 Oktober 2014. H 226

telah terjadi dengan berbagai interpretasi yang erat kaitannya dengan sikap hidup, pendekatan atau orientasinya oleh karena itu perbedaan pandangan terhadap peristiwa masa lampau, yang pada dasarnya ialah objektif dan absolut, pada giliran-nya akan menjadi kenyataan yang relatif



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa desa di Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.

Dari beberapa desa tersebut yang menjadi lokasi penelitian saya adalah: desa Rantebulahan, desa Salumaka, desa Saludurian, desa Salubanua, desa Pamoseang dan Kelurahan Mambi. Di sinilah saya melakukan wawancara dan mencari data-data terkait dengan penelitian ini yang di mana penelitian saya ini adalah penelitian lapangan yang nota benanya data yang saya dapat itu kemudian adalah hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan ataupun tokoh masyarakat setempat yang ada di beberapa desa tersebut.

Mambi adalah kecamatan yang sangat luas yang terletak di perbatasan Kabupaten polewali mandar, dan juga kabupaten Majene yang ada di sebelah barat kabupaten Mamasa yang penduduk aslinya terbagi ke dalam beberapa suku ada suku Pennei, suku Pattaek dan Suku Toraja yang ke semuanya itu terbagi ke dalam beberapa desa yang saat ini kecamatan mambi ini sudah terbagi ke dalam 3 kecamatan.

B. Sejarah Kedatangan Islam di Mambi

Islam pertama kali masuk di daerah mambi pada abad ke-17. Menurut warga setempat bahwa Islam pertama sekali masuk di daerah Mambi dibawah oleh seorang agamawan yang bernama To Ilang.¹

To Ilang ini adalah seorang agamawan yang mendatangi daerah kerajaan Pitu Ulunna Salu pada waktu itu daerah yang beliau datang adalah desa pamoseang. To Ilang ini Menyebarkan agama Islam pertama kali di Pamoseang, tapi sebelum dia sampai kepada pamoseang itu dia juga mendatangi beberapa daerah sebelumnya. Seperti kerajaan Tabang, kerajaan Matangga, kerajaan Rante Bulahan, kerajaan Mambi.

¹Abdul Salam, (60) Tokoh Masyarakat, Wawancara, (Salubanua): pada 27, November, 2018

To Ilang ini adalah seorang penganjur agama dari kerajaan Balanipa yang secara otomatis untuk mencapai daerah pamoseang itu yang terletak di wilayah kerajaan mambi pada saat itu harus melalui beberapa kerajaan lain seperti Kerajaan Tabang, Kerajaan Matangnga, dan Kerajaan Rante Bulahan..²

Bukti sejarah yang membuktikan bahwa Pamoseang adalah daerah yang pertama kali di datangi Islam di wilayah Mambi itu dibuktikan dengan adanya sebuah kuburan tua yang sampai saat ini, masyarakat setempat belum mengetahui pasti, siapa yang sebenarnya berkubur didalamnya. Konon, kuburan tua yang kini berumur ratusan tahun itu, adalah kuburan dari salah satu penyebar Agama Islam yang datang di Mambi tempo dulu sekitar Tahun 1602 M. Toilang.³

Toilang inilah yang diperkirakan meninggal di Mambi dan dikuburkan di Kampung Galung Desa Pamoseang. Dan dia datang ini tidak diketahui kedatanganannya dan beliaunya bernama Toilang, tinggal di Pamoseang dan kawin dengan salah satu anak Tomakaka.

Dari perkawinannya itu, dikarunia satu orang puteri yang bernama Santrianja. Namun anak semata wayang itu, terlebih dahulu meninggal dunia, membuat keturunan anak cucu Toilang di Pamoseang tidak ada satu orangpun," papar Kepala Kantor Urusan Agama Mambi.⁴

Toilang selama di Pamoseang menurut yang orang tua dulu, semasa hidupnya memiliki pengikut yang cukup banyak, khususnya dalam wilayah Pitu Ulunna Salu (Kecamatan Mambi, Aralle dan Kecamatan Tabulahan). Sehingga membuat ketiga Kecamatan hasil pemekaran Kecamatan Mambi itu, merupakan wilayah penganut Agama Islam terbesar di wilayah Pitu Ulunna Salu (PUS) yang juga masuk administrasi Kabupaten Mamasa.

²Abdul Salam (60) Tokoh Masyarakat, Wawancara. Salubanua:, Pada 27 November 2018

³Abd. Salam. (60) Tokoh Masyarakat Wawancara.(Salubanua): pada tanggal 27 November, 2018

⁴Kadri S.pd,(55) Ketua KUA, Wawancara. (Mambi): pada tanggal, 28November, 2018.

Toilang yang diduga keras adalah seorang pengembara dan ulama dari pulau Jawa, melakukan pengembaraan sambil mengajarkan Agama Islam akhirnya meninggal dunia dan dikuburkan di Pamoseang. Versi lain yang menguatkan, Toilang berasal dari Pulau Jawa. H.M.Syuaib Abdullah (Imam Masjid Agung Syuhada Polman) menuturkan, salah seorang ulama besar pada saat itu (1600-red) meninggalkan Pambusuang dan sampai hari ini kuburannya tidak diketahui pasti dimana letaknya. Kuburan tua yang ada di Pamoseang, barangkali itulah kuburannya yang memiliki nama asli Mas Surya Adi Logo. "Toilang memiliki nama asli Mas Surya Adi Logo yang punya kekerabatan dekat dengan masyarakat Pambusuang Kabupaten Polman, diperkirakan meninggal dunia sekitar tahun 1602 dan kuburannya tidak diketahui," tutur H.M.Syuaib Abdullah mengaku salah seorang turunan Mas Surya Adi Logo.

Kuburan tua Pamoseang yang berada di tengah hutan belantara Kecamatan Mambi, terletak 7 km dibelahan barat dari pusat pemerintahan kecamatan Mambi dan kuburan tersebut, sampai saat ini, dikeramatkan masyarakat setempat, karena memiliki berbagai keunikan yang tidak sama dengan kuburan lainnya. Satu diantaranya dari sekian keunikan adalah, kuburan Toilang tidak berlumut, tidak tertimbun dedaunan yang jatuh dari dahan, padahal pohon-pohon besar berada disekelilingnya, pokoknya kuburan itu bersih seperti setiap hari disapu, yang dibenarkan oleh warga lainnya. Saya sudah menyaksikan sendiri kuburan tua itu, disekelilingnya tidak ada dedaunan yang menjatuhnya, batu nisannya tidak berlumut, padahal usia kuburan itu sudah ratusan tahun. Bahkan diseputar batu nisan itu, tumbuh pohon-pohon besar yang mengelilinginya,⁵

Harta warisan yang ditinggalkan Toilang di Mambi yang tetap dikenang, ada dua jilid buku yang ditinggalkan, yaitu Buku Yasin disimpan oleh Imam Masjid Batu Lotong Ulu Manda Kabupaten Majene, dan sebuah Al Qur'an asli tulisan tangan yang

⁵Kadri. S.Pd. (55) Kepala KUA Mambi, Wawancara, Mambi,,: Pada tanggal 28 November 2018

disimpan oleh Drs.Muh.Darwis (Guru SMU Neg I Mambi dan sekarang bertugas di Mamasa)⁶

Di luar dari Itu tidak adalagi harta warisan yang bias kita liat karna mushallah pun yang dulunya di bangun Bersama masyarakat itu sudah tidak ada karna suda di lewati jalan.Satu satunya yang masi bias kita liat sekarang adalah batu Nisan kuburan beliau yang ada di tengah hutan belantara yang tidak semua orang bias masuk kesana di sebabkan oleh jalanan yang masi setapak yang harus di tempuh dengan jalan kaki itu menyulitkan bagi sebagian orang untuk bias melihat langsung kuburan tua itu.

C. Posisi Islam di Mambi Pada Masa Orde Baru

Setelah presiden Sukarno turun, secara otomatis rezim Orde Lama juga terhenti. Bersamaan dengan itu, lahirlah orde lain sebagai penerus perjuangan. Orde ini tidak lain adalah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto. Orde ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 32 tahun.⁷

Kalau dilihat dari segi fisik, Indonesia sangat berkembang dan maju. Di berbagai tempat (terutama di kota-kota besar) bangunan-bangunan besar dan mewah didirikan. Tapi jika ditinjau dari segi politik, maka Indonesia semakin menurun. Karena ‘trias politika’ sebagai lembaga-lembaga tertinggi negara, yang berfungsi hanya lembaga eksekutif saja, sementara dua lembaga lainnya, baik itu lembaga legislatif dan yudikatif kurang atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Kedua lembaga ini tunduk di bawah lembaga eksekutif. Keduanya tidak lebih hanyalah sebagai robot yang gerak-geriknya diatur oleh lembaga eksekutif.

Kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan politik. Terjadi ketegangan antara PKI dan tentara di masa- masa akhir kekuasaan Sukarno, kelompok-kelompok agama (terutama Islam dan Kristen) memutuskan untuk beraliansi dengan tentara. Sejak tahun 1961 hingga akhir

⁶Sudirman S.Pd, (45) Kepala Sekola SDN Salubanua, Wawancara,Rante Bulahan: pada tanggal 31 November, 2018

⁷Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Baru 1966-1998, <http://ranggambojoarea.blogspot.com/2011/06/sistem-pendidikan-indonesia-pada-masa.html>, diakses 19 Desember 2018.

kekuasaan Sukarno, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dipegang dua orang Menteri. Menteri Pendidikan Dasar dipegang oleh Prijono, seorang tokoh Murba yang dekat dengan PKI, sedangkan Menteri Pendidikan Tinggi dipegang oleh Sjarief Tajeb, seorang tokoh militer.

Dengan dukungan kelompok agama, pada akhirnya Sjarief Tajeb dapat mewajibkan pendidikan agama di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia, meskipun UU Pendidikan 1950 tidak mewajibkan pendidikan Agama.

Kudeta berdarah 30 September 1965 yang gagal telah mengubah arah politik bangsa Indonesia. Dalam perlawanan terhadap PKI yang dilakukan setelah kudeta, kaum Muslim dan Kristen bekerjasama bahu membahu dengan tentara. Pada sidang MPRS tahun 1966 diputuskan bahwa pendidikan agama wajib dilaksanakan dari tingkat Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Tetapi konversi besar yang terjadi itu disamping menggembirakan bagi sebagian tokoh agama, juga telah menjadi pemicu bagi timbulnya ketegangan dan konflik antara tokoh-tokoh Islam dan Kristen.⁸

Dan apa yang kemudian terjadi di Indonesia pada umumnya itu kemudian menjadi pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan Islam di Mambi karena sejak masuknya Islam di Mambi sampai kepada zaman Orde Baru agama Islam itu kemudian menjadi agama yang minoritas dan setelah masuk di zaman Orde Baru dengan adanya kebijakan pemerintah untuk kemudian mewajibkan semua sekolah untuk memasukkan pelajaran agama mulai dari bangku sekolah dasar itu kemudian memberikan dampak positif kepada daerah-daerah yang penduduk Islam-nya masih minoritas bisa berkembang. Dan juga dengan adanya pembangunan tempat-tempat ibadah juga kemudian semakin menambah semangat dan aura agama Islam yang ada di Mambi yang pada saat itu masih bersifat minoritas.

⁸*Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Baru* 1966-1998, <http://ranggambojoearea.blogspot.com/2011/06/sistem-pendidikan-indonesiapada-masa.html>, diakses 19 Desember 2018.

Jadi ketika berbicara tentang posisi islam di mambi pada masa orde baru maka posisinya adalah sebagai agama yang minoritas tapi mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dengan adanya kebijakan seperti yang suda di ungkapkan tadi di atas.⁹

Itu kemudian di benarkan oleh Imam masjid Mambi H. Ruslan Badaruddin A.Md. beliau mengatakan bahwa islam di mambi pada masa pemerintahan pak Sueharto itu mengalami perkembangan yang cukup pesat bukan berarti bahwa sebelumnya itu tidak berkembang akan tetapi pada masa orde baru itu perkembangannya itu ada dari banyak segi mulai dari segi pendidikan, politik dan juga pemerintah pada waktu itu.

Lanjut dan salah satu keberhasilan dari tokoh tokoh agama dan pemerinta saat itu di kecamatan mambi adalah meskipun islam pada waktu itu di sini bersipat agama yang minoritas namun kita mampu hidup dan tentram berdampingan dengan penganut agama lain seperti kristen yang menjadi agama mayoritas pada waktu itu.¹⁰

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan Islam di Mambi.

Faktor pendukung perkembangan Islam di Mambi dapat di bagi ke dalam beberapa yeaitu Sosil Budaya, Politik, pendidikan, Dari segi Perdagangan, dan Letak geografis Mambi.

1. Sosial Budaya.

Islam di mambi di lihat dari segi sosial budaya adalah tentu kita dapat melihat budaya yang sangat kental di tengah tengah masyarakat di antaranya adalah:

Pelaksanaan maulid nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi salahsatu bukti bahwa islam di mambi memiliki eksistensi dan kebersamaan yang sangat erat dan pelaksanaanya ini dapat kita lihat di semua kalangan masyarakat kecamatan mambi pada umumnya yang beragama islam pada umumnya

⁹Sudirman S.Pd, (45)Kepala sekola SDN salubanua *Wawancara*, (Rantebulahan):pada tanggal 31 November, 2018.

¹⁰H. Ruslam Badaruddin A.Md, (70) Imam Mesjid Raya Mambi. *Wawancara*, (Mambi),: pada tanggal, 03 Desember, 2018.

a. Pelaksanaan Maulid.

Pelaksanaan Maulid di desa Salubanua merupakan sebuah kegiatan yang bersifat rutinitas yang setiap tahunnya dilaksanakan terkait masalah pelaksanaannya tidak ada yang terlalu menonjol dalam artian bahwa pelaksanaannya itu sama seperti yang dilakukan di wilayah mandar pada umumnya namun tentu punya nilai-nilai tersendiri seperti Makdodak (memasak beras ketang di dalam bambu). Yang aromanya itu sangat khas karena dia dimasak dalam Bambu itu tanpa dilapisi, ini beda dengan yang dilakukan oleh masyarakat bugis yang dia bernama lamang karena kalau lamang dia dilapisi daun pisang.

b. Pelaksanaan halal bihalal.

Halal bihalal ini dilaksanakan pada saat selesainya pelaksanaan hari raya Idul Fitri pelaksanaannya itu biasanya diadakan antar masjid sekecamatan Mambi pelaksanaannya berupa pertandingan yang melibatkan mulai dari anak-anak sampai kepada orang dewasa semisal di bagian anak-anak yaitu pertandingan hapal surat pendek, lomba Adzan, lomba Tilawa tingkat anak-anak dan juga lomba praktek pelaksanaan shalat. Sedangkan untuk orang dewasa adalah kasida Rebana untuk ibu-ibu, dan juga kegiatan olahraga yang banyak macamnya seperti tarik tambang, volley, takraw dan lomba-lomba keolahragaan lainnya.

Dan dengan adanya kegiatan ini semangat dari masyarakat desa itu sangat luar biasa yang masing-masing membawa gengsi mereka tanpa menghilangkan nilai-nilai persaudaraan yang ada di tengah-tengah masyarakat dan kegiatan ini dilaksanakan dan menjadi program pemerintah setiap tahunnya yang sengaja dilakukan untuk menjaga kekompakan masyarakat Islam dan juga untuk sebagai ajang pengembangan bakat anak muda yang ada di berbagai desa di kecamatan Mambi.¹¹

¹¹Kadri S.Pd, (55) Kepala KUA Mambi. *Wawancara*; (Mambi), pada tanggal, 28 November, 2018.

2. Politik.

Islam di mambi di tinjau dari segi politik itu juga kemudiang memiliki pengaruh yang sangat besar ini bisa kita lihat dari peranan parah tokoh agama di mambi yang bisa bekerja sama dengan baik dengan tokoh tokoh agama lainnya yang ada di kecamatan mambi karna meskipun kita tauk bahwa di zaman orde baru itu sempat terjadi ke tegangan antara tokoh2 agama namun di kecamatan mambi itu beda di sini jusru mereka hidup rukun dan damai dengan nilai nilai toleransi yang cukup baik.¹²

Selain itu factor lainnya adalah pada masa orde baru juga kecamatan mambi ini masi di bawa naungan kabupaten Polmas (polewali Mamasa) yang di mana meskipun di kecamatan mambi secara khusus minoritas islam tapi tetap saja pemerintahan itu kemudian di kendalalikan secara umum oleh Pemerintah Polmas pada waktu itu yang nota benenya adalah mayoritas islam maka tentu kebijakan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah pada waktu itu harus sesuai dengan norma norma agama tanpa memberatkan agama sepihak saja.

3. Pendidikan

Islam di mambi di tinjau dari segi pendidikan tentu memiliki perkembangan yang besar itu di latar belakang oleh kebijakan pemerintah untuk menerapkan pendidikan agama mulai dari bangku sekolah dasar.

Meski saat itu belum ada pesantren yang di di rikan di sini tapi islam tetap mengalami perkembangan yang pesat karna di sini suda ada beberapa sekola dasar yang berlakon islam seperti madrasah ibtidaiah yang ada di kecamatan Mambi yang sengajah di bangun oleh pemerintah waktu itu untuk bisa mengajarkan kepada anak anak mulai dini di ajarkan pengetahuan agama.

Di luar dari pendidikan yang bersifat akademis banyak juga Pendidikan yang di lakukan yang sifatnya non akademis seperti perguruan-perguruan yang di adakan

¹²Muh, Ilyas, S.Ip, (45) Pegawai Kantor Camat Mambi, *Wawancara* (Mambi,): pada tanggal 10 Desember 2018

oleh masyarakat di kampung kampung yea itu anak anak pada saat itu di tuntut oleh orang tua untuk pergi belajar mengaji di ruma pak amam atau ke ruma warga yang di anggap mampu dan memiliki skil di bidang baca tulis alqur-an ini jelas karna saya waktu itu meskipun suda mulai agak besar cuman tetap saja saya masi rajin bersama teman teaman dan itu menjadi suatu kegembiraan tersendiri bagi kami waktu itu yang kadang harus bermalam di ruma guru kami karna jarak yang cukup jauh dari ruma dan kita kesana harus berjalan kaki.¹³

4. Dari segi perdagangan.

Islam di Mambi di lihat dari sisi perdagangan juga mengalami perkembangan yang cukup pesat ini terjadi karna di pengaruhi oleh kondisi geografis Mambi yang berada di tengah tangan atau di kelilingi oleh desa desa yang ada di wilayah kecamatan Mambi pada waktu itu yang sekarang suda terbagi menjadi tiga kecamatan di samping itu karna Mambi juga adalah satu satunya pasar tradisional yang masi tergolong dekat yang bisa di datangi oleh seluruh masyarakat pada waktu itu.

Karna pasar yang bisa di datangi oleh masyarakat waktu di tu di luar dari pasar mambi ini adalah pasar Wonomulyo yang lebi di kenal oleh masyarakat Mambi dengan sebutan *Kampung Jawatapi* itu sangat jauh karna bisa di tempuh oleh masyarakat pedalaman sampai satu minggu berjalan kaki sambi membawa bahan bahan hasil pertanian mereka ataupun Rotan yang mau di jual di pasar.¹⁴

Ini yang membuat masyarakat lebih memili pasar mambi yang bisa di jangkau dengan waktu yang lebi sedikit karna bagi masyarakat pelosok suda bisa memjangkau dengan maksimal dua hari saja pulang balik dengan jalan kaki maupun berkuda bagi yang suda memiliki kuda.

Sedangkan pedagang pedagang yang berdagang di pasar mambi ini di huni oleh pedagang pedagang dari Wonomulyo, Bugis pinrang, Rappang, dan juga pedagang

¹³Sudirman S.Pd(45) Kepala Sekola SDN Salubanua, Wawancara, (Rantebulahan): pada tanggal 31 November 2018

¹⁴Sudirman S.Pd, (45) Kepala Sekola SDN Salubanua, Wawancara, (Rante Bulahan): pada tanggal 31, November, 2018.

pedagang dari makassar yang tentu beragama islam di samping itu juga yaaa tentu ada masyarakat lokal yang berdagang yang biasanya cuman menjual rempa-rempa dan hasil pertanian lainnya seperti sayur sayuran dan buah buahan yang banyak di sini seperti manggis dan lansat'

5. Letak Geografis Mambi

Letak Geografis Mambi Yang berada di tengah Tengan dan juga sebagai pusat perdagangan di Beberapa desa di Mambi Ini sangat mendorong Proses perkembangan Islam. Karna Islam yang berkembang di kecamatan Mambi ini kemudian bisa cepat berkembang ke desa desa melalui perdagangan yang yang di sana banyak pedagang pedagang dari polewali, pinrang dan Sidrap dan bahkan banyak di antara mereka yang suda bermungkim di sana.

Selain itu masyarakat mambi juga adalah masyarakat yang yang di kenal luwes dan mudah berinteraksi dengan masyarakat lain sehingga membuat masyarakat mambi itu muda menerima agama Islam.

Dan juga kepercayaan mereka sebelumnya kan kebanyakan animisme yang percaya kepada *Dehata* (percaya kepada makhluk yang katanya bisa memberi kenyamanan dan ketentraman) karna masyarakat dahulu di sana itu rata rata berpindah-pinda jadi ketika mereka suda pindah ke daerah lain itu harus dulu izin sama pemilik hutan itu supaya ketika mereka menggarap hutan itu tidak ada yang mengganggu yang di namai *Dehata* ini kemudian bisa di luruskan oleh kaum agamawan yang menjadi penyebar waktu itu bahwa sebenarnya yang punya semua langit dan bumi dan seisinya adalah Allah dan itu kemudian bisa di terima oleh masyarakat.¹⁵

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah Mambi adalah daerah yang berpenduduk masyarakat yang kental dengan budaya-budaya peninggalan nenek moyang yang di sebut kepercayaan animisme dan dinamisme maka untuk kemudian menghentikan kebudayaan itu tentu sulit karena kepercayaan ini suda menjadi

¹⁵H. Ruslam Badaruddin A.Md, Imam Mesjid Raya Mambi (70) Wawancara Pada tanggal 03 Desember 2018

kepercayaan yang suda menjadi turun temurun dalam masyarakat mambi di luar dari itu untuk masyarakat mambi yang sebelumnya suda memiliki agama lain juga menjadi paktor tersendiri karna untuk kemudian meyakinkan orang untuk memeluk Islam dengan mereka yang suda beragama kristen itu sulit karna agama kristen ini suda di anut lebi dulu dari mereka meskipun sesungguhnya masyarakat ini adalah masyarakat yang satu suku dengan masyarakat toraja dan masyarakat mambi yang masi tergolong ke dalam suku pattaek, dan suku pannei ini hanya memiliki kepercayaan animisme dan di namisme saja yang tergolong masi bisa menerima Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Islam pertama kali masuk di daerah Mambi pada abad ke 17. Menurut warga setempat bahwa Islam pertama sekali masuk di daerah Mambi di bawah oleh seorang agamawan yang bernama To Ilang.

To Ilang ini adalah seorang agamawan yang mendatangi daerah kerajaan Pitu Ulunna Salu pada waktu itu daerah yang beliau datangi adalah desa pamoseang. To Ilang ini Menyebarkan agama Islam pertama kali di Pamoseang, tapi sebelum dia sampai kepada pamoseang itu dia juga mendatangi beberapa daerah sebelumnya. Seperti kerajaan Tabang, kerajaan Matangga, kerajaan Rante Bulahan, kerajaan Mambi. Ini terjadi karna To Ilang ini adalah seorang penganjur agama dari kerajaan Balanipa yang secara otomatis untuk mencapai daerah Pamoseang itu yang terletak di wilaya Kerajaan Mambi pada saat itu harus melalui beberapa Kerajaan yang di Sebutkan di atas.

Bukti sejarah yang membuktikan bahwa Pamoseang adalah daerah yang pertama kali di datangi Islam di wilaya Mambi itu di buktikan dengan adanya sebuah kuburan tua yang sampai saat ini, masyarakat setempat belum mengetahui pasti, siapa yang sebenarnya berkubur didalamnya. Konon, kuburan tua yang kini berumur Ratusan tahun itu, adalah kuburan dari salah satu penyebar Agama Islam yang datang di Mambi sekitar Tahun 1602 M. Toilang. Toilang inilah yang diperkirakan meninggal di Mambi dan dikuburkan di Kampung Galung Desa Pamoseang.

Toilang, tinggal di Pamoseang dan kawin dengan salah satu anak Tomakaka dari perkawinannya itu, dikarunia satu orang puteri yang bernama Santrianja. Namun anak semata wayang itu, terlebih dahulu meninggal dunia, membuat keturunan anak cucu Toilang di Pamoseang tidak ada satu orangpun, Toilang selama di Pamoseang menurut yang orang tua dulu, semasa hidupnya memiliki pengikut yang cukup banyak, khususnya dalam wilayah Pitu Ulunna Salu (Kecamatan Mambi, Aralle dan

Kecamatan Tabulahan). Sehingga membuat ketiga Kecamatan hasil pemekaran Kecamatan Mambi itu, merupakan wilayah penganut Agama Islam terbesar di wilayah Pitu Ulunna Salu (PUS) yang juga masuk administrasi Kabupaten Mamasa. Toilang yang diduga keras adalah seorang pengembara dan ulama dari pulau Jawa, melakukan pengembaraan sambil mengajarkan Agama Islam akhirnya meninggal dunia dan dikuburkan di Pamoseang.

Versi lain yang menguatkan, Toilang berasal dari Pulau Jawa. H.M.Syuaib Abdullah (Imam Masjid Agung Syuhada Polman) menuturkan, salah seorang ulama besar pada saat itu (1600-red) meninggalkan Pambusuang dan sampai hari ini kuburannya tidak diketahui pasti dimana letaknya. Kuburan tua yang ada di Pamoseang, barangkali itulah kuburannya yang memiliki nama asli Mas Surya Adi Logo. "Toilang memiliki nama asli Mas Surya Adi Logo yang punya kekerabatan dekat dengan masyarakat Pambusuang Kabupaten Polman, diperkirakan meninggal dunia sekitar tahun 1602 dan kuburannya tidak diketahui," tutur H.M.Syuaib Abdullah mengaku salah seorang turunan Mas Surya Adi Logo.

Kuburan tua Pamoseang yang berada di tengah hutan belantara Kecamatan Mambi, terletak 7 km dibelahan barat dari pusat pemerintahan kecamatan tersebut, sampai saat ini, dikeramatkan masyarakat setempat, karena memiliki berbagai keunikan yang tidak sama dengan kuburan lainnya. Satu diantaranya dari sekian keunikan adalah, kuburan Toilang tidak berlumut, tidak tertimbun dedaunan yang jatuh dari dahan, padahal pohon-pohon besar berada disekelilingnya, pokoknya kuburan itu bersih seperti setiap hari disapu, yang dibenarkan oleh warga lainnya. Saya sudah menyaksikan sendiri kuburan tua itu, disekelilingnya tidak ada dedaunan yang menjatuhinya, batu nisannya tidak berlumut, padahal usia kuburan itu sudah ratusan tahun. Bahkan diseputar batu nisan itu, tumbuh pohon-pohon besar yang mengelilinginya Harta warisan yang ditinggalkan Toilang di Mambi yang tetap dikenang, ada dua jilid buku yang ditinggalkan, yaitu Buku Yasin disimpan oleh Imam Masjid Batu Lotong Ulu Manda Kabupaten Majene, dan sebuah Al Qur'an asli

tulisan tangan yang disimpan oleh Drs.Muh.Darwis (Guru SMU Neg I Mambi dan sekarang bertugas di Mamasa)

2. Proses perkembangan Islam di Mambi pada masa Orde Baru adalah di mulai dengan adanya kebijakan pemerintah untuk menerapkan pendidikan agama itu mulai di ajarkan dari tingkat sekolah dasar selain dari itu islam juga di Mambi berkembang dari segi politik itu dapat di lihat dari posisi islam yang ada di sana yang bersifat minoritas namun mampu hidup berdampingan dengan agama agama lain yang ada di kecamatan mambi, selain itu karna juga meskipun kecamatan Mambi secara khusus adalah minoritas islam tapi pusat pemerintahan waktu itu kemudian secara administrasi masuk kedalam wilayah Kabupaten Polmas waktu itu yang yang masi di bawa naungan Privinsi Sulawesi selatan yang nota benenya ketika di gabungkan dengan wilayah Kabupaten Polmas waktu itu maka tentu bukan lagi minoritas secara umum.

Kemudian islam juga di sana berkembang dari segi budaya kebudayaan Islam yang kemudian nampak di tengah tengah masyarakat mambi pada umumnya adalah pelaksanaan maulid nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di lakukan di hampir semua desa yaang ada di kecamatan Mambi yang proses pelaksanaannya itu di sesuaikan dengan budaya daerah masing masing, yang ke dua adalah pelaksanaan Halal Bihalal kegiatan ini menjadi kegiatan rutin masyarakat yang menganut agama islam di mambi yang biasanya di laksanakan mulai dari tingkat desa sampai kepada tingkat kecamatan Mambi. Yang pelaksanaannya adalah setelah selesainya perayaan Idul Fitri.

3. Faktor Pendukung Perkembangan Islam di Mambi pada masa Orde Baru ada tiga yang pertama adalah pendidikan, Kebudayaan dan juga Politik.

- a. Pendidikan.

Islam di Mambi di tinjau dari segi pendidikan tentu memiliki perkembangan yang besar itu di latar belakang oleh kebijakan pemerintah untuk menerapkan pendidikan agama mulai dari bangku sekolah dasar. Meski saat itu belum ada pesantren yang di rikan di sana tapi Islam tetap mengalami perkembangan yang pesat karna di sana

sudah ada beberapa sekolah dasar yang berlatar Islam seperti madrasah ibtidaiyah yang ada di kecamatan Mambi yang sengaja dibangun oleh pemerintah waktu itu untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak mulai dini pengetahuan agama. Di luar dari pendidikan yang bersifat akademis banyak juga perguruan-perguruan yang diadakan oleh masyarakat di kampung-kampung yang dilakukan untuk anak-anak pada saat itu di tuntut oleh orang tua untuk pergi belajar mengaji di rumah pak imam atau ke rumah warga yang dianggap mampu dan memiliki skill di bidang baca tulis alqur'an ini

Sedangkan faktor penghambatnya adalah karena Islam di Mambi ini bersifat minoritas jadi secara otomatis ketika masyarakat Islam ini mau menyuarakan sesuatu yang bersifat umum untuk semua masyarakat maka tentu sulit karena ya namanya juga minoritas maka memang perlu dulu berembuk lebih terutama harus ada kesepakatan dari agama lain seperti Kristen.

b. Kebudayaan.

Islam di Mambi dilihat dari segi sosial budaya adalah tentu kita dapat melihat budaya yang sangat kental di tengah-tengah masyarakat di antaranya adalah:

Pelaksanaan Maulid Nabi Besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam ini menjadi salah satu bukti bahwa Islam di Mambi memiliki eksistensi dan kebersamaan yang sangat erat dan pelaksanaannya ini dapat kita lihat di semua kalangan masyarakat kecamatan Mambi pada umumnya yang beragama Islam pada umumnya.

c. Politik

Islam di Mambi ditinjau dari segi politik itu juga kemudian memiliki pengaruh yang sangat besar ini bisa kita lihat dari peranan para tokoh agama di Mambi yang bisa bekerja sama dengan baik dengan tokoh-tokoh agama lain yang ada di kecamatan Mambi karena meskipun kita tau bahwa di zaman Orde Baru itu sempat terjadi ketegangan antara tokoh-tokoh agama namun di kecamatan Mambi itu beda di sini justru mereka hidup rukun dan damai dengan nilai-nilai toleransi yang cukup baik.

Selain itu faktor lainnya adalah pada masa Orde Baru juga kecamatan Mambi ini masih di bawah naungan kabupaten Polmas (pewali Mamasa) yang di mana meskipun di kecamatan Mambi secara khusus minoritas Islam tapi tetap saja pemerintahan itu

kemudian di kendalalikan secara umum oleh Pemerintah Polmas pada waktu itu yang nota benenya adalah mayoritas Islam maka tentu kebijakan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah pada waktu itu harus sesuai dengan norma norma agama tanpa memberatkan agama sepihak saja. Karna Kabupaten Polmas secara umum adalah Mayoritas Islam.

B. Implikasi.

1. Kepada jurusan sejarah dan kebudayaan islam penelitian ini dpat di gunakan sebagaibahan kajian diskusi akademik tentang proses masuknya islam di kecamatan Mambi.
2. Kepada jurusan sejarah dan kebudayaan islam sebagai referensi dan acuan untuk mengetahui dan memahami proses perkembangan islam di kecamatan mambi pada masa Orde Baru.
3. Kepada masyarakat sebagai wadah untuk menemukan informasi dan pengetahuan bahwa bagaimana sejarah perkembangan dan kondisi islam di mambi pada masa Orde Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung, M. Hum. 1999. *Metode Penelitian Sejarah* Jakarta: Logos Wacana Ilmu,
- Andaya Leonado Y. 2004. “*Warisan Arung Palakka Sejarah Sulawesi Selatan Abad Ke-17*”, Makassar: Innawa.
- Depu Andi. 1970. *Adat Istiadat Kerajaan Mandar*. Mandar.Yayasan Maha Putra Mandar.
- Katu Samiang. 2012. *Peta Islamisasi dan krestenisasi di Sulawesi selatan*. Makassar: Alauddin University press.
- Mas’ud Rahman Darmawan. 1988. *Dalam disertasi “puang dan Daeng”*; Kajian Sistem Nilai Budaya Orang Balanipa. Mandar: Universitas Hasanuddin, ujung pandang Indonesia.
- Rama, Bahaking. 2000. “*Mengislamkan Daratan Sulawesi, Suatu Tinjauan Metode Penyebaran*” Jakarta: PT, Parado Tama Wiragemilang.
- Rahmat, dkk .*Buku Daras Praktek Penelusuran Sumber Sejarah dan Budaya*. Jakarta: Gunadarma Ilmu.
- Sewang Ahmad M. 2006. *Seputar tentang Kerajaan Balanipa di Mandar*. Mandar: Yayasan Maha Putra Mandar.
- Sewang, M. Ahmad. 2013. *Peranan Orang Melayu Dalam Perkembangan Islam di Sulawesi Selatan*.Makassar: Alauddin University Pres.
- Sjamsuddin, Helius 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sewang M Ahmad. 2013. *Peranan Orang Melayu Dalam Perkembangan Islam di Sulawesi Selatan*. Makassar: Alauddin University Pres.
- Sinrang, A.Syaiful. 1994.*Mengenal Mandar Sekilas Lintas Ujung Pandang*: Yayasan Kebudayaan Mandar Rewata Rio.
- Salihima, Syamsues. 2015. *Dalam Rihlah Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*. Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar
- Harun Nasution, Prof. Dr, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2003.
- Masduki Baidlawi-Rizal Mustary, Mahfud MD; *Bersih dan Membersihkan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- MA, M. Nur hasan, *Ijtihad Politik NU*. Yogyakarta: Penerbit Manhaj, 2010.

- Nizar, Samsul, *Sejarah Pendidikan Islam ; Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rosullulah Sampai Indonesia*, Cetakan 3, Jakarta, Kencana, 2009.
- Luth, Thohir, M. Natsir; *Dakwah Dan Pemikirannya*. Jakarta: Gema Insani. 1999.
- Natsir. M. Mencari Modus Vivendi Antarumat Beragama Di Indonesia. Jakarta: Media Dakwah, 1980.
- Nursyirwan. Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Setelah Kemerdekaan. *Didaktika Jurnal Kependidikan* Vol. 4 No. 2 November 2009.
- Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. Tersedia: <http://istanailmu.com/2011/04/08/pendidikan-islam-dalam-sistempendidikan-nasional/html>. diakses 19 Desember 2018.
- Syaodih Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Sistem Pendidikan Indonesia Pada Masa Orde Baru 1966-1998. diakses 19 Desember 2018.
- Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Madjid M.Dien dan Wahyudi Johan. *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* cetakan 1 Jakarta, Kencana Oktober 2014

LAMPIRAN

Bersama Mayarakat di Desa Salubanua 27 November 2018



Wawancara Dengan Salah Satu Kepala Sekolah yang ada di Desa Salubanua
Bapak Sudirman S.Pd. Bersama Masyarakat



Wawancara Dengan Salah Satu Tokoh Agama di Kelurahan Mambi Terkait Dengan Perkembangan Islam Di Mambi pada masa orde baru



M A K A S S A R

Wawan Cara dengan Salah Satu Pegawai Kantor Kecamatan Mambi di mambi pada tanggal 29 November 2018



Wawancara dengan Kepala KUA Mambi Pada Tanggal 28 November 2018



Wawan Cara dengan Pegawai Kantor Camat Mambi



ALAUDDIN
MAKASSAR



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama saya Nawir, saya lahir di Kaloean pada tanggal 10 Juni 1996, dan saya sekarang berumur 22 tahun saya lahir sebagai anak pertama dari 9 bersaudara dari pasangan suami istri ayahanda **Kasman**, dan ibuk saya bernama **Kamaria** ibuk dan bapak saya masing masing tammatan SD dan mereka kerja sebagai seorang petani dan saya sangat bangga terlahir dari seorang petani karna bagi saya petani adalah seorang pekerja keras yang tidak tauk lelah hanya untuk mencari kelansungan hidup hal ini cukup banyak memberikan pelajaran kepada saya untuk kemudian harus selalu kuat dan tidak bole bergantung kepada siapapun dalam hal apa saja sehingga saya akan selelu berusaha untuk mandiri dalam proses menuntut ilmu untuk biografi saya tamat SD pada tahun 2011 di SDN 017 Salumaka, kemudian tamat MTS 017 Mambi tahun 2008, dan pada tahun 2014 saya lulus di MA Negeri Polewali dan melanjutkan keperguruan tinggi UIN Alauddin Makassar mengambil jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Strata 1. Selama kuliah, Saya juga aktif di beberapa organisasi seperti pernah menjadi pengurus HIMASKI (Himpunan Mahasiswa Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam) HMI Komisyariat Adab dan Humaniora, dan UKM Olahraga UIN Alauddin Makassar dan selain itu saya bangga menjadi mahasiswa Sejarah dan Kebudayaan Islam karena dengan ini saya juga sudah pernah mengelilingi beberapa daerah seperti sudah berkunjung di luar kota seperti Jakarta, bandung, jogja, bali, dan Surabaya. Saya juga sanga tbersyukur mendapat kesempatan dari Allah swt untuk bisamenimba

ilmu sebagai bekal dihari-hari yang akan datang nanti. Saya berharap bias membahagiakan orang tua, keluarga dan orang-orang yang selalumemberikan dukungan serta semangat. Semoga apa yang saya dapatkan selama proses pendidikan dapat dimanfaatkan dan diamalkan terutama untuk diri sendiri dan kepada orang lain. aamiin

